



BENGARAN BERTAJILAN PERBANGKAI BAKAN  
MEMORONG PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN  
MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN  
TARIKH 1980 - 1995



PERPUSTAKAAN PUKAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	25 6 97
Asal dari	FAK. EKONOMI
Banyaknya	1 ELP.
Harga	HADIAH.
No. Inventaris	970907181
No. Klas	

OLEH

ROSSMELY A. LILI

Nomor Mahasiswa : 92 01 235

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1997

**PENGARUH DEREGULASI PERBANKAN DALAM  
MENDORONG PENINGKATAN TABUNGAN  
MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 1980-1995**

**OLEH**

**RHOUSMEILY A. LILI**  
*No. Mahasiswa : 92 01 235*



**SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN  
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
EKONOMI JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNGPAJANG**

**DISETUJUI OLEH :**

**PEMBIMBING I**

**(Drs. NUBUN AHMAD, MS)**

**PEMBIMBING II**

**(Drs. HIDAYAT ELY)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pemahaman ilmiah dan literatur yang penulis miliki, membuat peluang akan adanya kekurangan baik yang menyangkut tehnik penyusunan maupun materi pembahasannya.

Selesainya skripsi ini atas kerja keras, bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Bapak Drs. Nuhun Ahmad, MS. dan Bapak Drs. Hidayat Ely selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan bijaksana telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. Djabir Hamzah, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS. selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. L. P. Tulung, MS. sebagai pensehat akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Para dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Bapak pimpinan Bank Indonesia beserta staff, khususnya ibu Diah dan bapak Abidin Ali.
7. Sahabat-sahabat penulis, Baso Kone, Irma, Yudith, Ayu, Edwin, Poi, Enga, Drs. Agussalim dan Melvin.
8. Terkhusus yang terkasih Ferry Supardjo yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih yang tak terhingga pada Bapak (dr. H. Sjamsi Lili), Ibu (Anneke S. Lili), Kakak (Alyam & Istri, Gaby & Suami, Liliana, Zaldy) dan Adik (Olga) serta kemenakan-kemenakan tercinta yang telah mengasuh dan memdidik dengan penuh kasih sayang serta memberi kesempatan kepada penulis untuk menikmati jejnjang pendidikan sampai pada penyelesaian study di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Kiranya Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ujungpandang, Juni 1997

*Penulis*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Masalah Pokok .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	8
1.4. Hipotesis .....	9
<b>BAB II. METODOLOGI</b> .....	10
2.1. Kerangka Konseptual dan Tinjauan Pustaka .....	10
2.2. Kerangka Analisis .....	13
2.3. Model Analisis .....	15
2.4. Batasan Variabel .....	16
2.5. Jenis dan Sumber Data .....	17
2.6. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB III. BAHASAN TEORI</b> .....	19
3.1. Tabungan / Saving .....	19
3.2. Pengertian dan Alasan Deregulasi .....	24
3.3. Kebijakan Moneter .....	26
3.4. Produk Domestik Regional Bruto .....	34
3.5. Hubungan Tingkat Suku Bunga, Jumlah Tabungan dan PDRB.....	48
<b>BAB IV. PENGARUH DEREGULASI PERBANKAN TERHADAP MOBILISASI TABUNGAN MASYARAKAT</b> .....	51
4.1. Perkembangan Tabungan Masyarakat .....	53
4.2. Keadaan PDRB Sulawesi Selatan .....	61
4.3. Tingkat Suku Bunga Bank Dalam Era Deregulasi .....	64
4.5. Perkembangan Jumlah Kantor Bank .....	67
4.6. Hasil Kajian Dampak Deregulasi Terhadap Tingkat Tabungan.....	69

BAB V. PENUTUP .....	75
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran-saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	viii
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	ix



## DAFTAR TABEL



	Halaman
III.1. Produk Domestik Regional Bruto .....	39
III.2. Contoh Perhitungan Nilai Tambah (Value Added).....	41
IV.1. Perkembangan Tabungan Dan Deposito Di Sulawesi Selatan Tahun 1980- 1995.....	53
IV.2. Perkembangan Tabanas Dan Taska Di Sulawesi Selatan Tahun 1980- 1995.....	56
IV.3. Perkembangan Tabungan Masyarakat (Deposito, Tabanas dan Taska) Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995.....	60
IV.4. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1988-1993 Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995.....	62
IV.5. Perkembangan Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan.....	66
IV.6. Perkembangan Kantor Bank Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995.....	67
IV.7. Perkembangan Tabungan, PDRB, Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Kantor Bank Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995.....	71

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki suatu keharusan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi. Keharusan membangun itu dilaksanakan, apakah atas dasar kemampuan pembiayaan domestik ataupun tidak, merupakan tuntutan yang harus dilakukan setiap negara dimanapun.

Indonesia sebagai negara, juga menyadari akan pentingnya hal dimaksud (pembangunan), yang diketahui merupakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, dengan pemerintah sebagai "agent of development". Untuk itu, segala potensi yang dimiliki haruslah dikerahkan dan dioptimalkan penggunaannya, agar dapat membantu proses peningkatan output (barang dan jasa), yang selanjutnya digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini salah satu potensi yang dimaksud mencakup pula keberadaan suatu lembaga keuangan, yang dalam hal ini Bank, selaku lembaga keuangan yang berusaha di bidang jasa keuangan.

Keberadaan lembaga ini (Bank) sangat diperlukan untuk mengakumulasi atau memobilisir dana masyarakat bagi pendanaan domestik, sebagaimana arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pembinaan lembaga perbankan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu meliputi upaya pengembangan kualitas lembaga perbankan yang diarahkan untuk memperluas daya jangkauan



pelayanannya, agar mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Sedangkan upaya pengembangan kualitas lembaga ini, diarahkan supaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga fungsi dan peranan media ini sebagai suatu financing institutions dapat berdaya guna.

Pembentukan lembaga perbankan yang tangguh memerlukan landasan hukum yang kokoh agar mampu memberikan situasi yang kondusif bagi upaya-upaya pendanaan atau pengembangan bidang ekonomi. Landasan yang dimaksud meliputi Undang-Undang Pokok Bidang Perbankan beserta ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, semua ketentuan hukum tersebut seyogyanya dapat dibenahi antar waktu, agar dapat memberikan dukungan yang memadai untuk dunia perbankan dalam pemberian pelayanannya.

Sasaran pembenahan ketentuan perbankan antara waktu yang diambil, meliputi:<sup>1</sup>

Pertama, pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya pagu kredit, program selektif, penentuan tingkat bunga yang dilakukan Bank Indonesia.

Kedua, memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi dan mobilisasi tabungan domestik. Hal ini dapat dikatakan telah dimulai secara gencar pada dekade tahun 1980-an yang ditandai oleh keberadaan beberapa kebijakan deregulasi dunia perbankan seperti paket 1 Juni 1983 maupun paket-paket lainnya.

---

<sup>1</sup> Mudrajat Kuntjoro, "Deregulasi Perbankan Indonesia", Jakarta : Prisma, 1994, hal 63

Sasaran deregulasi 1 Juni 1983 yang menghapus kebijakan pagu kredit, serta diperbolehkannya bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat bunga pinjaman dan deposito berjangkanya. Selain itu, Peranan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI) pun ditiadakan, sehingga bank-bank terdorong untuk melakukan kompetisi dalam upaya memobilisir dana masyarakat maupun menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada sektor usaha. Walaupun penghapusan kredit likuiditas ini telah diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan menyediakan fasilitas diskonto yang dapat digunakan untuk membantu bank-bank yang memiliki kesulitan likuiditas. Fasilitas ini diberikan oleh bank Indonesia dengan suku bunga yang sangat murah yang pada dasarnya merupakan fasilitas Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Lender of Last Resort. Dalam kebijakan itupun, Bank Indonesia menerbitkan pula Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai fasilitas bantuan jangka pendek Bank Indonesia kepada bank-bank umum yang memiliki kelebihan dana dan merupakan instrumen penting dalam kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation) yang merupakan salah satu piranti kebijaksanaan moneter.

Sesudah kebijakan di atas, pemerintah melalui Bank Indonesia menggulirkan lagi kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) yang merupakan paket deregulasi untuk kemudahan ekspansi kelembagaan bank-bank komersial (swasta). Ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan ini meliputi izin pembukaan kantor-kantor cabang bank baru, menurunkan reserve requirement dari 15% menjadi 2%, mengizinkan BUMN untuk menempatkan deposito/dananya pada perbankan swasta.



Hasil deregulasi PAKTO 88 menimbulkan peningkatan kompetisi di antara bank-bank umum dalam permodalan, peningkatan kualitas profesionalisme, perbaikan organisasi dan sistem kerjanya serta mendorong penciptaan produk-produk baru.

Beberapa tahun berselang setelah PAKTO 88 diimplemantasikan, diterbitkan lagi paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 yang mengatur tentang :<sup>2</sup>

- a. Pengembalian secara bertahap kredit likuiditas bank-bank yang diperoleh dari Bank Indoensia dalam bentuk KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (kredit Modal Kerja Permanen)
- b. Mewajibkan dunia perbankan untuk menyalurkan kredit dalam bentuk KUK (Kredit Usaha Kecil) sebanyak 20% dari total kredit yang disalurkan dan dilaksanakan sanksi bilamana tidak mencapai presentase tersebut, di mana sanksi tersebut berpengaruh kepada tingkat kesehatan lembaga.

Tahun berikutnya digulirkan paket kebijakan 28 Februari 1991 (PAKTRI 91) yang meliputi beberapa aspek kebijaksanaan antara lain, perubahan cara pengukuran kesehatan bank serta sanksi untuk pelanggaran yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan tersebut. Sedangkan aspek lainnya yang dapat pula penulis ungkapkan meliputi aspek kepemilikan, kepengurusan, perizinan serta aspek-aspek kehati-hatian (prudential aspect) dalam pengelolaan perbankan.

Kemudian tahun 1992 diterbitkan UU Perbankan no 7 yang merupakan revisi dari UU no 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang

<sup>2</sup> Abdul Rahman Fanetto, "Beberapa Aspek Teori Dan Pengimplementasian Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan, Dengan Kasus Indonesia", Ujungpandang : Hasanuddin University Press, 1996, hal 7

mengelompokkan dunia perbankan hanya ke dalam Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Ketentuan ini sekaligus menghilangkan bank-bank khusus seperti Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan lain-lain, serta perlindungan hukum bagi kerahasiaan bank.

Setelah dikeluarkannya UU tersebut, maka di tahun 1993 pemerintah menerbitkan lagi paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 atau yang lebih dikenal dengan PAKMEI 1993, yang isinya antara lain menyangkut :<sup>3</sup>

- a. Ketentuan mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR) yang diperlonggar dengan mengizinkan bank untuk memasukkan seluruh laba tahun lalu sebagai bagian dari modal, serta mengurangi bobot resiko untuk fasilitas kredit kepada BUMN dalam perhitungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
- b. Ketentuan mengenai penyediaan cadangan untuk kredit lancar menjadi 0,5% dan menunda pelaksanaan ketentuan tersebut dari Desember 1993 menjadi Desember 1994.
- c. Ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) diperlonggar dengan memperluas cakupan kredit yang digolongkan KUK dan memperkenalkan mekanisme SBPU-KUK untuk meningkatkan kerja sama antar bank dalam pemberian KUK. Dengan ketentuan baru ini, rasio KUK untuk keseluruhan perbankan secara rata-rata meningkat dari 21,1% menjadi 26,7% dan dengan

<sup>3</sup> J. Soedrajat Djuandono, "Kebijaksanaan Moneter dan Perbankan di Indonesia Dewasa Ini", Warta ISEI, Jakarta, Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1993, hal 12

demikian memberi kesempatan yang lebih luas bagi perbankan untuk meningkatkan kreditnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan demi mencapai berbagai sasaran di masa depan, antara lain diarahkan pada sasaran penyediaan pendanaan domestik dalam skala yang memadai, demi merangsang kegiatan ekonomi. Tindakan tersebut dicerminkan oleh tindakan deregulasi sektor perbankan, sebagai salah satu sumber pendanaan investasi dan atau modal kerja untuk pengembangan sektor produksi.

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara ekonomi sebagaimana diketahui dapat saja berasal dari bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah, bantuan luar negeri dan juga tabungan masyarakat. Namun, di antara sumber-sumber pembiayaan yang dimaksud, tabungan masyarakatlah yang sangat diharapkan dapat berperan aktif sebagai sumber yang potensial maupun aktual dalam menyediakan berbagai bentuk pendanaan yang disalurkan melalui sektor perbankan.

Sehubungan bahasan yang diungkap di atas, tabungan masyarakat pasca deregulasi perbankan tahun 1983 dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang pesat di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan selama periode Desember 1984 hingga Desember 1990, yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 77,5 milyar atau 37,9% setiap tahun di Sulawesi Selatan.

Rata-rata kenaikan tersebut diperhitungkan dari jumlah tabungan sebesar Rp. 66,3 milyar pada Desember 1984, yang kemudian menjadi Rp. 608,7 milyar



pada Desember 1990. Sedangkan total dana di luar giro yang berhasil dihimpun selama periode yang sama (Desember 1984 - Desember 1990), tercatat sebesar Rp.1,8 trilyun. Pada hal sebelum berbagai pengguliran paket deregulasi yang dikemukakan di atas, total dana di luar giro yang berhasil dihimpun oleh sektor perbankan hanyalah Rp. 130,1 milyar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh deregulasi perbankan dalam upaya mendorong peningkatan tabungan masyarakat cukup efektif di daerah ini (Sulawesi Selatan).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka penulis terdorong untuk menelaah persoalan tabungan masyarakat pasca deregulasi perbankan, dengan judul :

*"PENGARUH DEREGULASI PERBANKAN DALAM MENDORONG PENINGKATAN TABUNGAN MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN, TAHUN 1980 - 1995"*

## 1. 2. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan masalah pokok sebagai berikut :

1. 2. 1. Apakah terjadinya akumulasi tabungan masyarakat di sektor perbankan hanya disebabkan oleh deregulasi sektor perbankan selama ini semata, ataudkah masih terdapat faktor-faktor lainnya yang ikut berperan terhadap hal tersebut di Sulawesi Selatan selama tahun 1980-1995.
1. 2. 2. Bagaimanakah dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat, serta didorong oleh daya tarik kenaikan suku bunga bank yang menarik minat masyarakat untuk menabung di daerah ini selama periode tersebut.

### 1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian dan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap langkah deregulasi perbankan, guna mendorong peningkatan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan selama periode 1980-1995.
2. Mengetahui pengaruh peningkatan PDRB serta kenaikan tingkat bunga bank terhadap jumlah tabungan masyarakat dalam perbandingannya dengan langkah deregulasi perbankan di Sulawesi Selatan selama tahun observasi (1980-1995).

#### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dan penulisan ini pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin menelaah lebih lanjut pengaruh deregulasi sektor perbankan atas perkembangan tingkat tabungan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, dalam memberi gambaran hubungan pengaruh langkah deregulasi, peningkatan PDRB, serta peningkatan suku bunga bank terhadap perkembangan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan selama tahun 1980-1995.

#### 1.4. Hipotesis

- 1.4.1. Diduga bahwa kebijakan deregulasi perbankan memiliki pengaruh yang cukup kuat, terhadap mobilisasi tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan selama periode 1980-1995.
- 1.4.2. Diduga pula bahwa tabungan masyarakat akan dapat ditingkatkan, bilamana peningkatan pendapatan masyarakat diikuti pula dengan peningkatan suku bunga sektor perbankan sebagai peransang daya tarik masyarakat untuk menabung selama periode 1980-1995.



## BAB II METODOLOGI



### 2. 1. Kerangka Konseptual Dan Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar bahasan masalah pokok yang telah dirumuskan, terdapat beberapa ulasan teori dan kerangka konseptual yang relevan. Sehubungan dengan itu, pada uraian dibawah ini diajukan beberapa analisis yang berkaitan dengan topik bahasan tulisan ini.

Tabungan dengan pendanaan investasi mempunyai kaitan yang erat secara teoritis, karena adanya tabungan masyarakat tersebut tidaklah berarti dana hilang dari peredaran, tetapi dipinjam/dipakai oleh pengusaha untuk membiayai investasinya. Penabung mendapatkan bunga atas tabungannya, sedang pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama harapan keuntungan yang diperoleh dari investasi lebih besar dari bunga tersebut.<sup>4</sup>

Makna tabungan itu sendiri, didefinisikan :

*"....tabungan-tabungan pribadi sama dengan pendapatan perseorangan yang tersedia dikurangi pengeluaran untuk konsumsi, atau barang konsumsi, sekali pendapatan itu ditabung maka itu dapat ditanam (diinvestasikan) baik secara langsung atau tidak langsung".<sup>5</sup>*

Sementara menurut teori klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih

<sup>4</sup> Nopirin, "Ekonomi Moneter", Yogyakarta : BPF, tahun 1984, hal 54

<sup>5</sup> Dudley G. Lockett, "Uang dan Perbankan", edisi ke 2, Jakarta : Erlangga, tahun 1988, hal 425

terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.<sup>6</sup>

Adanya kaitan antara tabungan dengan investasi yang diungkapkan pada alinea kedua di atas adalah sebagai akibat bekerjanya mekanisme tingkat bunga. Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga keinginan (desired) mengadakan investasi oleh perusahaan sama dengan keinginan menabung dari masyarakat. Dengan demikian dalam menghimpun dana-dana masyarakat melalui tabungan lembaga-lembaga formal untuk keperluan investasi, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah.

Kebijaksanaan pemerintah yang erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, adalah kebijaksanaan deregulasi di bidang perbankan seperti deregulasi perbankan 1983, paket oktober 1988, paket Januari 1990 dan sebagainya.

Secara umum deregulasi dapat diartikan sebagai tindakan meminimalkan atau meniadakan regulasi (peraturan) yang ada, yang dianggap sebagai penghambat dan dapat menggagalkan usaha mereka yang terkena regulasi secara berlebihan.

Deregulasi sering disamakan dengan privatisasi, Savas (1987) mengartikan privatisasi sebagai berikut :

*"Tindakan kebijaksanaan yang mengurangi peranan pemerintah atau meningkatkan peranan swasta, baik dalam kegiatan perekonomian maupun dalam pemilikan aktiva atau kekayaan ekonomi"*<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Nopirin, "Ekonomi Moneter", Yogyakarta : BEFE, tahun 1984, hal 54

<sup>7</sup> Arwar Nesution, "Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Perbankan Indonesia", Jakarta : PT. Gramedia, tahun 1990, hal 1

Seperti pada paket deregulasi perbankan 1983, yang pada intinya adalah pencabutan pagu kredit dan tingkat suku bunga. Ini berarti pemerintah memberikan hak kepada bank-bank pemerintah maupun swasta, untuk menentukan sendiri tingkat bunga deposito dan pinjaman. Sehingga kemampuan penyaluran kredit pinjaman oleh sektor perbankan, makin mencerminkan kekuatan bank-bank itu sendiri dalam menghimpun dana-dana masyarakat.

Dalam uraian sebelumnya kandungan PAKTO 1988 telah diungkapkan, namun paket ini juga mengandung 2 komponen utama : pertama, penurunan barrier of entry (hambatan masuk) ke dalam sektor keuangan dan perbankan, yang sangat mempermudah persyaratan untuk pembukaan cabang bank baru. Kebijakan ini sangat baik karena membantu meningkatkan kompetisi di sektor keuangan dan perbankan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong diversifikasi produk-produk yang sangat menguntungkan konsumen. Komponen kebijakan yang kedua : adalah penurunan reserverequirement (cadangan wajib) dari 15% menjadi 2%, karena menurut textbook, cadangan wajib yang terlalu tinggi merupakan suatu implicit taxation pada sistim perbankan. Akibat dari komponen kedua PAKTO 1988 ini, bank-bank memiliki kelebihan likuiditas yang sangat besar, sehingga berlomba-lomba mencari nasaba baru.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meraih tujuan-tujuan makro ekonomi, yang dijalankan oleh Bank Sentral dalam menentukan jumlah unag yang beredar yang bakal menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga boleh dikatakan bahwa kebijaksanaan



moneter sangat berperan penting, terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan nasional.<sup>8</sup>

Sedangkan di sisi lain secara konseptual, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai nilai dari barang akhir yang diproduksi oleh suatu daerah. Dalam pengertian lebih lanjut bahwa Produk Domestik Bruto merupakan istilah dalam skala nasional sedang Produk Domestik Regional Bruto merupakan istilah pada tingkat regional atau propinsi.

Hasil dari suatu pembangunan daerah antara lain dapat dilihat pada pendapatan regional dan pertumbuhan ekonominya. Dalam pada itu bahwa semakin tinggi pendapatan regional daerah tersebut akan berkorelasi positif dengan tingkat tabungan masyarakat, yang berarti akan memberikan dukungan terhadap pengembangan investasi daerah tersebut, di masa-masa selanjutnya.

## 2.2. Kerangka Analisa

Dalam menganalisa peningkatan tabungan masyarakat sebelum dan sesudah deregulasi perbankan 1 Juni 1983, 27 Oktober 1988, dan 29 Mei 1993 di Sulawesi Selatan tahun 1980-1995 maka dipergunakan delapan tahapan analisa yaitu :

1. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 belum berlaku yakni dari tahun

<sup>8</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, "Ekonomi". jilid 1, edisi ke 12, Jakarta : tahun 1986, hal 110

1980 sampai dengan tahun 1982, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.

2. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1988 belum berlaku yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1987, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.
3. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1993 belum berlaku yakni dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.
4. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan setelah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 berlaku yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.
5. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan setelah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1988 berlaku yakni dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.
6. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan setelah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1993 berlaku yakni dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini pendapatan domestik regional bruto.

7. Menganalisa tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, yakni dari tahun 1980 sampai tahun 1995, berikut variabel yang mempengaruhinya, dalam hal ini adalah pendapatan domestik regional bruto dan memasukkan kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 sebagai variabel *dummy*.
8. Menganalisa peningkatan jumlah kantor bank di Sulawesi Selatan sebagai dampak yang ditimbulkan dari paket deregulasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk menentukan besarnya dari variabel pendapatan domestik regional netto terhadap peningkatan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun sesudah deregulasi perbankan 1983, 1988 dan 1993 serta pengaruh variabel pendapatan domestik regional netto dan kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 secara bersama-sama maka digunakan model ekonometrik dalam menganalisa.

### 2.3. Model Analisa

Metode analisa yang akan digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis yang diajukan adalah metode ekonometrika kuadrat terkecil (*Ordinary Last Square*).<sup>9</sup> Dalam hal ini rumusan modelnya menjadikan tabungan masyarakat sebagai variabel *dependen*, dan PDRB Sulawesi Selatan, tingkat suku bunga, jumlah kantor bank, dan kebijaksanaan deregulasi perbankan sebagai variabel *independen*, yang diajukan sebagai berikut :

<sup>9</sup> J. Supranto, "Ekonometrika", Jilid I, Jakarta : LPFE-UI, 1988, hal 68

$$Y = a_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

Y = Tabungan

X<sub>1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

X<sub>2</sub> = Tingkat suku bunga

X<sub>3</sub> = Jumlah kantor bank

a<sub>0</sub>, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> dan b<sub>3</sub> adalah merupakan parameter, sedang e mencerminkan indikator gangguan yang biasanya dalam operasionalisasi model diasumsikan nol.

Dalam menganalisa peningkatan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan secara terpisah, maka variabel dummy pada persamaan di atas akan disesuaikan.

#### 2.4. Batasan Variabel

Agar tidak terjadi penafsiran ganda dalam menafsirkan setiap variabel, maka variabel-variabel yang digunakan perlu batasan sebagai berikut :

2.4.1. Tabungan (saving) adalah dana masyarakat yang ada pada lembaga-lembaga keuangan formal dalam bentuk tabanas, taska dan deposito.

2.4.2. Pendapatan regional daerah, Hal ini dapat ditunjukkan melalui Pendapatan Domestik regional Bruto daerah Sulawesi Selatan yang dihitung menurut harga konstan tahun 1983.

2.4.3. Tingkat suku bunga, yaitu suku bunga dalam negeri yang digunakan adalah bunga deposito yang berjangka pendek 12 bulan pada bank pemerintah. Alasan dipergunakan suku bunga deposito berjangka pendek merupakan asset yang banyak diminati oleh masyarakat dan masih adanya peranan/pengaruh yang besar dari bank-bank pemerintah dalam hal pembentukan tingkat bunga.

2.4.4. Jumlah kantor bank, yaitu jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di Sulawesi Selatan. Khusus Bank Umum mencakup Bank Pembangunan Daerah dan Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Asing.

2.4.5. Kebijakan deregulasi perbankan, yang dimaksudkan dalam penelitian dan penulisan ini adalah kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983, PAKTO 1988, PAKJAN 1990, dan PAKMEI 1993.

## 2.5. Jenis dan Sumber Data

2.5.1. Jenis Data, untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, maka dalam penulisan ini digunakan data sekunder yang terdiri data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif meliputi data perkembangan tabungan masyarakat Sulawesi Selatan dari tahun 1980-1995, sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan melalui pengkajian literatur yang relevan dengan penelitian dan penulisan

2.5.2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

- Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan



- Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan
- Berbagai Literatur yang relevan dengan penelitian dan penulisan ini.

## 2.6. Sistematika Pembahasan

- Bab. pertama** : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis dan sistematika pembahasan.
- Bab. kedua** : Metodologi, berisikan kerangka konseptual, metode analisis, batasan variabel, daerah penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta.
- Bab. ketiga** : Dikemukakan tentang tinjauan pustaka, yang berkenaan dan menyentuh tentang kerangka teoritis mengenai tabungan (saving) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dikaitkan dengan kebijaksanaan deregulasi perbankan.
- Bab. keempat** : Merupakan inti yaitu bab yang menguraikan tentang perkembangan tabungan, tingkat bunga, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kantor bank di Sulawesi Selatan, serta pengaruh kebijaksanaan deregulasi perbankan terhadap perkembangan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan.
- Bab. kelima** : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

### BAB III BAHASAN TEORI

#### 3.1. Tabungan / Saving

Seperti yang telah diuraikan pada bab II, tabungan dapat berarti uang yang disimpan atau disembunyikan atau ditimbun atau didepositokan pada lembaga-lembaga formal dari pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan konsumsi.

Pada referensi lain secara sederhana menyebutkan bahwa tabungan :

*"Merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi, atau tabungan sama dengan jumlah pendapatan yang dikurangi dengan jumlah konsumsi"*<sup>1</sup>

Sesuai pengertian ini, terlihat bahwa antara tingkat pendapatan, tingkat konsumsi dan tingkat tabungan, terdapat hubungan yang cukup kuat yang secara teoritis sehingga bentuk persamaan adalah sebagai berikut :

$$S = Y - C \dots\dots\dots (2)$$

Hubungan antara tingkat pendapatan dengan dengan tingkat konsumsi, dalam persamaannya adalah :

$$C = C_0 + cY \dots\dots\dots (3)$$

Dimana  $C > 0$  dan  $0 < c < 1$ ,  $C$  adalah tingkat konsumsi,  $C_0$  adalah titik perpotongannya pada ordinat, sedang  $c$  adalah koefisien atau kecenderungan mengkonsumsi marginal.

<sup>1</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Op. cit. hal 160

Fungsi konsumsi persamaan tersebut menggambarkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi melebihi pendapatan, sedangkan pada tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat konsumsi kurang dari pendapatan. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 3.1.a dimana bila konsumsi persis berada pada garis  $45^\circ$  maka tingkat pendapatan sama dengan tingkat konsumsi. Pada tingkat pendapatan rendah, maka fungsi konsumsi terletak di atas garis  $45^\circ$  karena tingkat konsumsi melebihi tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, individu atau rumah tangga akan mengorek tabungan (asumsi ada tabungan), sebaliknya pada tingkat pendapatan yang tinggi, individu atau rumah tangga akan menabung, karena tingkat konsumsi lebih rendah daripada tingkat pendapatan.

Hubungan-hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat konsumsi timbul dari perpotongan positif  $C$ , serta fakta bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau koefisien  $c$  selalu lebih kecil dari satu. Dalam hal ini kecenderungan mengkonsumsi marginal dapat diartikan sebagai kenaikan dalam tingkat konsumsi per unit karena adanya kenaikan pada tingkat pendapatan. Misalnya, tingkat pendapatan bertambah menjadi Rp. 100, maka tingkat konsumsi juga mengalami kenaikan, sebesar Rp. 75 bilamana  $c = 0,75$ , karena perbandingan antara kenaikan konsumsi dengan pertambahan pendapatan yang diterima yakni  $75/100$ , sama dengan  $0,75$  dan hasil inilah yang dimaksud dengan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", Jakarta : LPPS-UI, 1991, hal 112

Sementara hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat tabungan disebut fungsi tabungan/saving. Fungsi ini diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (2) dengan fungsi konsumsi pada persamaan (3). Dengan demikian akan diperoleh :

$$\begin{aligned}
 S &= Y - C \\
 &= Y (C - cY) \\
 &= -c + (1 - c) Y \dots\dots\dots (4)
 \end{aligned}$$

Persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa tabungan/saving adalah fungsi kenaikan dari tingkat pendapatan, karena keenderungan menabung marginal  $s = 1 - c$  adalah positif. Seperti pada contoh di atas, didapat bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,75, yang berarti bahwa setiap Rp. 75 dari tambahan pendapatan dikonsumsi, sedang sisanya sebesar Rp. 25 dari setiap tambahan atas pendapatan ditabung, yang berarti bahwa kecenderungan menabung marginal adalah 0,2. Dengan kata lain bahwa  $MPC + MPS$  sama dengan 1 atau  $s = 1 - c$ .<sup>11</sup>

Fungsi tabungan adalah bayangan terbalik dari fungsi konsumsi. Pada tingkat pendapatan yang rendah, tabungan adalah negatif, atau tingkat konsumsi melebihi tingkat pendapatan. Pengertian lebih lanjutnya, bahwa seorang individu atau rumah tangga dapat mengalami tabungan yang negatif dengan menghabiskan

<sup>11</sup> Ibid, hal 114

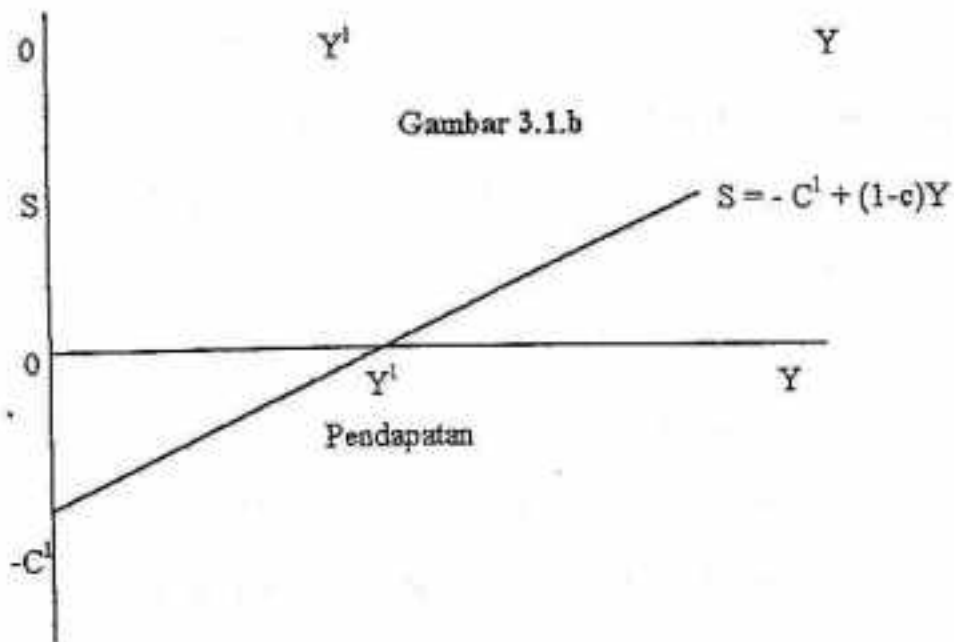
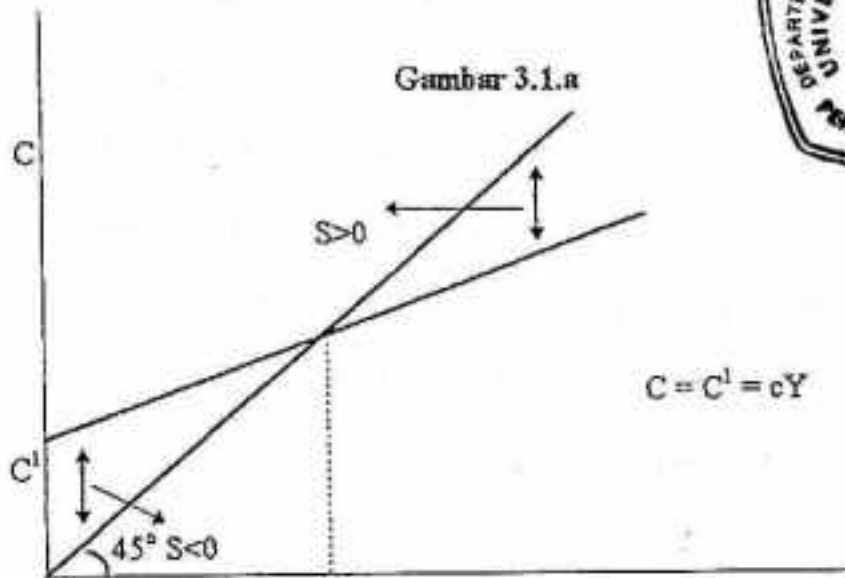
hartanya, misalnya rekening bank atau saham-saham yang dimiliki, untuk membayar pembelian-pembelian yang lebih dari pendapatannya.<sup>12</sup>

Hubungan antara fungsi konsumsi dan tabungan diperlihatkan pada persamaan (4) tersebut di atas juga dapat dilihat secara grafis dalam gambar 3.1. yakni bahwa jarak vertikal antara fungsi konsumsi dan garis  $45^\circ$  pada setiap tingkat pendapatan mengukur tabungan. Gambar 3.1.b. memperlihatkan fungsi tabungan yang berasal dari fungsi tabungan yang berasal dari fungsi konsumsi dalam gambar 3.1.a. dengan menarik jarak vertikal antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi pada setiap tingkat pendapatan.

Pada gambar 3.1.a memperlihatkan tingkat konsumsi naik bersama pendapatan, perpotongannya adalah  $C$  dan kemiringannya, yakni kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah  $c$ . Dapat dilihat bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi berada di atas tingkat pendapatan, yang menunjukkan bahwa individu atau rumah tangga membelanjakan lebih besar daripada mereka yang peroleh dan pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, konsumsi berada di bawah tingkat pendapatan, yang berarti individu atau rumah tangga menabung sebagian dari pendapatannya.

Sedang pada gambar 3.1.b adalah sesuai dengan fungsi konsumsi yang di atasnya. Pada tingkat pendapatan yang rendah, tabungan adalah negatif dan positif pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Dan pada tingkat pendapatan  $Y$ , tabungan sama dengan nol.

<sup>12</sup> Rudiger Dornbusch dan Stanley Fischer, "Makro Ekonomi", Edisi ke 3. Alih bahasa Rudy P. Sitompul, Drs, MA. Jakarta : Erlangga, 1986, hal 73



### 3.2. Pengertian dan Alasan Deregulasi

Pengertian tentang deregulasi seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu, bisa berarti tindakan atau kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi peranannya, dengan kata lain meningkatkan peranan sektor swasta atau lebih dikenal dengan istilah swastanisasi. Sementara alasan untuk melakukan deregulasi menurut Savas dapat dibedakan atas empat alasan, yakni alasan pragmatis, alasan ideologi, alasan komersil dan alasan populis.<sup>13</sup> Uraian lebih lanjut tentang keempat alasan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 3.2.1. Alasan Pragmatis

Alasan ini dilaksanakan karena adanya kesulitan dalam anggaran yang ditandai dengan defisit anggaran negara yang semakin besar, yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengurangi kegiatan negara dalam meningkatkan produktifitas.

Peningkatan produktifitas dan efisiensi di sektor negara termasuk BUMN dan BUMD dapat menyumbang pada peningkatan produktifitas kegiatan ekonomi secara nasional, serta mengurangi ketergantungan pembelanjaan maupun kegiatan usahanya pada anggaran dan sektor negara yang pada akhirnya akan mendorong sektor negara ke arah yang lebih baik.

<sup>13</sup> Anwar Nasution, *Op. cit.*, hal 2

### 3.2.2. Alasan Ideologi

Yang dimaksudkan oleh alasan ini adalah pengurangan pada sektor negara yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat. Adanya sektor negara yang terlalu besar, terlalu dominan dan terlalu banyak mencampuri kehidupan masyarakat mencerminkan etatisme, sehingga kebebasan individu dan demokrasi dirasa sangat kurang. Pengambilan keputusan pada sektor negara lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik, kurang efisien dan kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pengambilan keputusan melalui mekanisme pasar.

### 3.2.3. Alasan Komersil

Yang dimaksud dengan alasan ini adalah agar kegiatan ekonomi lebih banyak diserahkan kepada sektor swasta. Sebagian dari kegiatan pemerintah termasuk BUMN dan BUMD dapat diserahkan kepada sektor swasta karena bukan merupakan kegiatan yang unik atau hanya dapat dilakukan oleh kegiatan pemerintah secara efisien.

Hal lain yang mendasari alasan ini adalah pada umumnya manajemen sektor negara termasuk BUMN dan BUMD yang melakukan kegiatan non pemerintahan adakalanya kurang efisien, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, adanya mis-manajemen, penggunaan aktiva yang kurang optimal serta adanya perlindungan yang berlebihan sehingga terlindung dari persaingan sehat. Dengan pertimbangan inilah sehingga banyak dari kegiatan pemerintah termasuk



BUMN dan BUMD sudah mulai diserahkan kepada pihak swasta ataupun masing-masing individu pegawai negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, jasa pembersihan kantor-kantor serta pembayaran gaji pegawai dan lain-lain sebagainya.

#### 3.2.4. Alasan Populis

Alasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya, mengidentifikasi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya masalah penanggulangan sampah maupun keamanan lingkungan diurus dan diorganisir sendiri oleh masyarakat pada tingkat kelurahan ataupun pada tingkat RT.

#### 3.3. Kebijakan Moneter

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dijalankan dan diawasi oleh Bank Sentral dalam rangka meraih tujuan-tujuan makro ekonomi.

Secara garis besarnya, kebijakan moneter dapat digolongkan atas dua golongan, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif.<sup>14</sup> Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif meliputi; Operasi pasar terbuka, membuat perubahan pada tingkat bunga dan tingkat diskonto dan mengubah tingkat cadangan minimal. Sedangkan

<sup>14</sup> Sedono Sukirno, *Op. cit.* hal 263

kebijaksanaan moneter yang bersifat kualitatif meliputi; Pengawasan pinjaman secara selektif dan pembujukan moral.

### 3.3.1. Kebijakan Moneter Kuantitatif

#### 1. Operasi Pasar Terbuka

Yakni kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan cara melakukan jual beli surat berharga. Bentuk langkah-langkah yang dilakukan adalah tergantung pada masalah ekonomi yang dihadapi. Misalnya pada saat perekonomian mengalami resesi, maka untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, uang yang beredar perlu ditambah.

Pada kondisi tersebut, Bank Sentral dapat menambah jumlah uang yang beredar dengan cara melakukan pembelian terhadap surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank-Bank Umum. Dengan demikian pada saat Bank Sentral melakukan pembayaran surat-surat berharga tersebut, maka cadangan yang ada pada Bank-Bank Umum mengalami peningkatan, yang pada akhirnya menyebabkan kelebihan cadangan.

Pada saat Bank-bank Umum mengalami kelebihan cadangan, maka mereka dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan. Dengan begitu maka tabungan giral masyarakat juga akan mengalami peningkatan, dengan kata lain bahwa jumlah uang yang beredar turut meningkat pula. Demikian juga pada saat terjadi inflasi, Bank Sentral dapat mengatasinya dengan melakukan penjualan surat-surat berharga yang dampaknya akan mengurangi cadangan

minimal yang dimiliki oleh Bank-Bank Umum, sehingga pinjaman yang diberikan serta tabungan giral masyarakat akan mengalami perubahan.

Pada saat kondisi ekonomi dalam keadaan resesi, maka langkah yang ditempuh oleh Bank Sentral adalah langkah yang sebaliknya.

Operasi pasar terbuka tersebut dapat berhasil dengan asumsi sebagai berikut :

- Bank-Bank Umum tidak memiliki kelebihan cadangan, karena apabila terdapat kelebihan cadangan, maka Bank-Bank Umum dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh Bank Sentral dengan kelebihan cadangan tersebut. Berarti Bank-Bank Umum tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Akibatnya, uang yang beredar juga tidak mengalami perubahan.
- Dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjual-belikan. Pada negara yang sedang berkembng, kemampuan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan kegiatan operasi terbuka amatlah terbatas, karena selain Bank-Bank Umum rata-rata memiliki kelebihan cadangan, juga surat-surat berharga serta pasar untuk surat-surat berharga tersebut masih sangat terbatas.



## 2. Mengubah Tingkat Bunga dan Tingkat Diskonto

Apabila ada di Bank-Bank Umum yang mengalami kesulitan dalam membayar seluruh cek yang ditarik kepadanya, karena cadangan yang dimiliki telah berada di bawah cadangan minimal yang ditetapkan oleh Bank Sentral, maka Bank Sentral dapat membantunya dengan dua cara, yaitu dengan memberikan pinjaman atau membeli surat-surat tertentu yang dimiliki oleh Bank Umum tersebut yang sangat tinggi likuiditinya, seperti misalnya *treasury bill*. Langkah ini dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga.

Dalam mendiskontokan surat-surat berharga tersebut, Bank Sentral menetapkan tingkat (suku) diskonto dan dalam memberikan pinjaman, Bank Sentral menetapkan tingkat (suku) bunga bank atau Bank rate. Oleh karena itu, Bank Sentral dapat mempengaruhi uang yang beredar dan tingkat kegiatan ekonomi, misalnya apabila kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat kegiatan ekonomi yang diharapkan, maka Bank Sentral dapat meningkatkan kegiatannya dengan menurunkan tingkat diskonto. Dengan demikian, biaya (bunga) yang harus dibayar oleh Bank-Bank Umum untuk meminjam dari Bank Sentral menjadi lebih murah. Hal ini mengakibatkan Bank-Bank Umum akan memberikan pinjaman yang lebih banyak.

Demikian pula apabila terjadi kondisi yang sebaliknya, yakni Bank Sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi, maka langkah yang diambil adalah menaikkan tingkat diskonto, sehingga akan mendorong

Bank-Bank Umum untuk menaikkan tingkat bunga pinjamannya. Akibatnya, para pengusaha enggan untuk membuat pinjaman baru dan banyak di antara nasabahnya akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu, yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan ekonomi.

### 3. Mengubah tingkat Cadangan Minimal

Berhasilnya kedua kebijaksanaan tersebut di atas adalah tergantung pada cadangan yang dimiliki oleh Bank-Bank Umum.

Misalnya Bank Sentral telah menetapkan tingkat cadangan minimal sebesar 22 persen, maka untuk tabungan giral yang sebanyak 100 milyar cadangannya haruslah 22 persen dari 100 milyar tersebut. Tetapi kenyataannya, cadangan yang terdapat pada Bank-bank Umum adalah 25 persen, berarti terdapat kelebihan cadangan sebesar 3 persen. Dalam kondisi seperti ini, apabila Bank Sentral menetapkan kebijaksanaan operasi pasar terbuka yaitu menjual surat-surat berharga sebesar 3 persen, maka tabungan giral tidak mengalami perubahan, yang berarti uang yang beredar juga tidak mengalami perubahan.

Demikian pula apabila Bank Sentral menerapkan kebijaksanaan diskonto. Pada kondisi Bank-Bank Umum yang memiliki kelebihan cadangan, maka Bank-Bank Umum tidak akan meminjam kepada Bank Sentral dalam melaksanakan kegiatannya. Akibatnya kebijakan dengan merubah tingkat diskonto ini akan banyak mempengaruhi kegiatan Bank-

Bank Umum yang berarti uang beredar juga tidak akan mengalami perubahan.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka langkah terakhir yang ditempuh oleh Bank Sentral dalam mempengaruhi uang beredar dalam kebijaksanaan yang bersifat kuantitatif ini adalah dengan cara mengubah tingkat cadangan minimal. Seperti tersebut di atas dimana Bank-Bank Umum memiliki kelebihan cadangan sebesar 3 persen dari 22 persen yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yakni 25 persen dari 100 milyar adalah 25 milyar.

Dengan mengubah tingkat cadangan minimal menjadi 25 persen, maka Bank-Bank Umum tidak memiliki lagi kelebihan cadangan. Pada kondisi seperti itu, kebijakan operasi pasar terbuka dan kebijakan tingkat diskonto yang dilaksanakan oleh Bank Sentral dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar diharapkan akan berhasil.

### **3.1.2. Kebijakan Moneter Kualitatif**

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan (dikembangkan). Yang kedua adalah pembujukan moral, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan Bank-Bank Umum untuk

meminta Bank-Bank Umum melakukan langkah-langkah tertentu. Uraian tentang kedua jenis kebijaksanaan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pengawasan Pinjaman Secara Selektif

Bank sentral melakukan kebijaksanaan ini dengan tujuan memastikan bahwa apakah Bank-Bank Umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi yang dikendalikan adalah corak pinjaman dan investasi, bukan jumlah uang yang diwujudkan oleh Bank-Bank Umum melalui kegiatan meminjamkan dan menginvestasikan uang.

Misalnya di Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, maka untuk mempercepat perkembangan ekonomi, salah satu langkah yang ditempuh adalah menggalakkan sektor pertanian dan perindustrian. Dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut tentu diperlukan fasilitas-fasilitas untuk memperoleh modal. Oleh karena itu, dalam hal ini Bank Sentral memegang peranan penting yaitu dengan menjalankan kebijaksanaan pengawasan pinjaman secara selektif.

Untuk mendorong perkembangan sektor industri, Bank Sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan Bank-Bank Umum untuk meminjamkan sebahagian dananya kepada usaha-usaha di bidang industri. Demikian pula dengan pengembangan sektor pertanian, Bank Sentral dapat mengharuskan kepada Bank-Bank Umum untuk memberikan pinjaman yang

sifatnya jangka panjang. Untuk pertanian yang dilakukan secara kecil-kecilan, Bank Sentral dapat memerintahkan kepada Bank-Bank Umum untuk memberi pinjaman kepada sektor ini dengan syarat-syarat yang lebih ringan.

## 2. Pembujukan Moral

Kebijaksanaan ini dijalankan oleh Bank Sentral bukan dengan menetapkan peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis yang harus dijalankan oleh Bank-Bank Umum, tetapi langsung mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank-Bank Umum. Dalam pertemuan tersebut, Bank Sentral menjelaskan kepada Bank-Bank Umum tentang kebijaksanaan yang sedang dijalankan oleh pemerintah, serta bantuan-bantuan apa yang diharapkan dari Bank-Bank Umum dalam rangka pencapaian kebijaksanaan tersebut.

Dengan pertemuan ini, Bank Sentral dapat meminta kepada Bank-Bank Umum untuk mengurangi/menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi/menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu. Hal lain, Bank Sentral dapat pula meminta kepada Bank-Bank Umum agar melakukan perubahan-perubahan atas tingkat bunga yang mereka tetapkan.

Meskipun demikian, berhasil tidaknya kebijaksanaan ini tergantung pada sampai dimana Bank-Bank Umum memenuhi keinginan-keinginan dari Bank Sentral tersebut.

Kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dilaksanakan dan diawasi oleh bank sentral, baik dalam bentuk kegiatan operasi pasar terbuka,



kebijakan tingkat diskonto dan suku bunga serta perubahan terhadap ketetapan cadangan minimal Bank-Bank Umum sering dinamakan deregulasi di sektor Perbankan.

### **3.4. Produk Domestik Regional Bruto**

#### **3.4.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto**

Pengertian tentang Produk Domestik Regional Bruto tidak lain adalah nilai barang akhir yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Pengertian ini diambil berdasarkan definisi tentang Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) yang telah diuraikan pada bab II.

Yang membedakannya adalah kalau Produk Domestik Bruto itu berarti dalam skala nasional, sementara kalau Produk Domestik Regional Bruto berarti dalam skala regional atau propinsi.

Pengertian lain tentang Pendapatan Domestik Bruto (GDP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mungkin saja didapatkan dari berbagai literatur lain. Hal ini disebabkan karena tergantung dari pendekatan yang dipakai, apakah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan atau pendekatan pengeluaran.

Produksi yang dimaksud pada pengertian di atas, secara umum adalah antara lain, produksi mobil, produksi radio, produksi padi dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya tidak terbatas hanya sampai disitu pengertian tentang produksi. Karena misalnya, seorang pedagang yang menyimpan barangnya di gudang atau



mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain, itupun dinamakan produksi. Tapi hasilnya tidak terlihat atau tidak dapat diraba, dan inilah yang dimaksud dengan produksi jasa. Produksi jasa ini terbagi-bagi lagi, misalnya, jasa angkutan, jasa penyimpanan, jasa dokter dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi adalah suatu proses yang menciptakan atau menambah nilai, guna dan manfaat baru.<sup>15</sup>

Sementara kata *nilai* pada pengertian tersebut di atas berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian dinyatakan dalam satuan nilai uang dan tidak dinyatakan dalam satuan benda. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam penghitungannya, karena penghitungan yang dilakukan dengan ketiga pendekatan (produksi, pendapatan dan pengeluaran) hasilnya harus sama.

Sedang kata *akhir* pada pengertian tersebut di atas berarti semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Jadi Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto adalah hasil dari semua penjumlahan barang-barang dan jasa-jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu negara tertentu.

Secara singkat, Produk Domestik Bruto Produk Domestik Regional Bruto apabila diartikan perkata maka, Produk berarti yang dihitung adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa, Domestik, karena wilayahnya terbatas dalam suatu negara termasuk didalamnya orang-orang dan perusahaan-

<sup>15</sup> Ace Pratadireja, "Perhitungan Pendapatan Nasional", LP3ES, Jakarta 1977, hal 32

perusahaan asing, Bruto, karena masih mengandung angka penyusutan. Sedangkan kata regional berarti terbatas dalam suatu daerah di dalam suatu negara.

Kalau yang dihitung hanya terbatas pada warga negara saja, termasuk warga negara atau perusahaan milik warga negara yang berada di luar negeri, jadi warga negara asing dan perusahaan asing tidak dimasukkan, maka dinamakan pendapatan nasional bruto atau *gross national product* (GNP).

Selisih antara GDP dan GNP adalah pembayaran ke luar negeri dikurangi dengan pembayaran dari luar negeri, atau sering disebut *net faktor income to abroad*.<sup>16</sup> Pendapatan domestik bruto (PDB) dikurang dengan net faktor income to abroad sama dengan pendapatan nasional bruto (GNP).

#### 3.4.2. Perhitungan Pendapatan Regional

Bermula dari repelita II dan masyarakat Indoensia berkeinginan untuk pemeratakan hasil pembangunan ke seluruh penjuru tanah air, namun yang menjadi kendala dalam hal ini adalah tidak ada angka-angka yang memberi keterangan tentang pemerataan hasil pembangunan tersebut. Angka yang dimaksudkan adalah perhitungan pendapatan di tingkat regional (propinsi).

Dari berbagai usaha yang dilakukan pada akhirnya dilakukan penghitungan yang berdiri sendiribagi seluruh propinsi, dengan metode penghitungan sama dengan metode penghitungan di tingkat nasional. Meskipun

<sup>16</sup> Ace Pratadireja, *Ibid*, hal 38

sebelumnya telah dipakai beberapa cara, misalnya dengan mengalokasikan pendapatan nasional kepada propinsi-propinsi berdasar pada suatu cara tertentu agar jumlah pendapatan regional sama dengan pendapatan nasional. Tapi karena cara ini mempunyai beberapa kelemahan, seperti bahwa antara satu daerah dengan daerah yang lain banyak keanekaragamannya. Dan dengan pertimbangan inilah akhirnya cara penghitungannya yang berdiri sendiri bagi seluruh propinsi dipakai samapai sekarang.<sup>17</sup>

Dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan regional, sebenarnya ada tiga metode yang bisa dipergunakan, yakni metode penghitungan melalui pendekatan produksi (*Production Approach*), metode penghitungan melalui pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dan metode penghitungan melalui pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*).<sup>18</sup>

Yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam penulisan ini hanya metode penghitungan pendapatan melalui pendekatan produksi, karena untuk Indonesia dan seluruh propinsi-propinsi, metode penghitungan yang dipakai adalah metode penghitungan melalui pendekatan ini.

#### 3.4.3. Metode Penghitungan Melalui Pendekatan Produksi.

Pendapatan nasional dan pendapatan regional yang dihitung berdasarkan metode ini adalah dengan cara menjumlahkan produksi barang-

---

<sup>17</sup> Ibid. hal 73

<sup>18</sup> Ibid. hal 33

barang dan jasa-jasa akhir selama satu periode tertentu atau satu tahun kelender kalam di Indonesia.

Untuk metode penghitungan ini, perekonomian dibagi dalam 11 (sebelas) sektor, yang masing-masing sektor dibagi lagi kedalam subsektor-subsektor. Misalnya, sektor pertanian dibagi kedalam subsektor tanaman pangan, tanaman perdagangan rakyat, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, hasil kebutuhan dan hasil-hasil perikanan. Untuk sektor Industri dibagi kedalam subsektor perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Demikian pula dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor bank dan lembaga keuangan lain, sektor-sektor jasa dan lain-lain. Dengan demikian, kata sektor berarti bagian dari seluruh perekonomian dan subsektor merupakan bagian kecil dari sektor. Pembagian tentang sektor dan subsektor ini lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Semua hasil akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian tersebut dijumlahkan untuk menentukan besarnya pendapatan domestik bruto/pendapatan domestik regional bruto, biasanya output atau produksi suatu perusahaan atau sektor akan menjadi input bagi perusahaan atau sektor lain. Misalnya produk kapas akan menjadi input pabrik benang dan output pabrik benang akan menjadi input bagi perusahaan tekstil serta output pabrik tekstil akan menjadi input bagi perusahaan pakaian jadi, yang mana dari hasil jual yang diterima oleh perusahaan pakaian jadi tersebut sudah terkandung harga bahan mentah produksi kapas (sektor pertanian), produksi benang dan produksi tekstil

(sektor industri). Dengan demikian, kalau menjumlahkan produksi kapas, produksi benang produksi

Tabel 3.1  
 Produk Domestik Regional Bruto

Lapangan Usaha	Rupiah
1. Pertanian - Tanaman bahan makanan - Perkebunan Rakyat - Perkebunan Besar - Peternakan - Kehutanan - Perikanan	
2. Pertambangan dan Gelian - Pertambangan Migas - Pertambangan Non Migas	
3. Industri Pengolahan - Industri Besar dan Sedang - Industri Kecil dan Kerajinan - Industri Penggilingan Minyak - Gas Alam Cair	
4. Listrik Gas dan Air - Listrik - Gas - Air Minum	
5. Bangunan	
6. Perdagangan Restoran dan Hotel - Perdagangan Besar dan Eceran - Hotel - Restaurant	
7. Angkutan dan Komunikasi - Pengangkutan Kereta Api - Pengangkutan Jalan Raya - Pengangkutan Sungai - Pengangkutan Laut - Pengangkutan Udara - Jasa Penunjang Angkutan	
8. Bank dan Lembaga Keuangan - Bank - Asuransi - Koperasi - Lainnya	
9. Sewa Rumah	
10. Pemerintah & Hankam	
11. Jasa-Jasa - Jasa Perusahaan - Jasa Sosial - Jasa Hiburan - Jasa Perseorangan	
Produk Domestik Regional Bruto	

Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), karena tekstil dan produksi pakaian jadi, berarti kita melakukan penghitungan jenis barang berkali-kali dan inilah yang dimaksud dengan penghitungan ganda.

Oleh karena itu dalam penghitungannya, masing-masing harus dihitung pada perusahaan-perusahaan sendiri atau dalam sektor sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam setiap harga suatu barang sudah terkandung biaya bahan bakunya yang seharusnya dihitung pada perusahaan-perusahaan sendiri atau dalam sektor sendiri. Maka biaya atau harga bahan baku ini harus dikurangkan dari harga produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau sektor dan sisa dari pengurangan ini dinamakan nilai tambah, tambahan nilai atau nilai yang ditambahkan (*Value Added*).<sup>19</sup> Nilai tambah inilah yang menjadi sumbangan perusahaan atau sektor kepada produksi nasional.

Pada tabel 3.2 dapat dilihat contoh penghitungan value added, dimana untuk memproduksi pakaian jadi dilibatkan pula produk-produk lain seperti kapas, benang dan tekstil.

Dari tabel tersebut, nampak bahwa jika masing-masing perusahaan menghitung sendiri nilai akhir dari produksinya, maka untuk produk kapas mempunyai nilai tambah Rp. 1.000,- dengan asumsi bahwa tidak ada bahan baku yang digunakan. Sedangkan benang, tekstil dan pakaian jadi setelah diperkurangkan dengan bahan bakunya, masing-masing memberikan nilai tambah sebesar Rp. 500,- Rp. 750,- dan Rp. 2.750,-. Apabila nilai tambah dari

---

<sup>19</sup> Ibid. hal 34

semua produk dijumlahkan, maka totalnya sebesar Rp. 5.000,- dan hasil inilah yang masuk dalam penghitungan pendapatan domestik bruto/pendapatan regional bruto.

Tabel 3.2  
Contoh Penghitungan Nilai Tambah (Value Added)

No.	Jenis Produk	Harga	Nilai Tambah
1.	Kapas (Pertanian)	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	Benang (Industri)	Rp. 1.500	Rp. 500
	Tekstil	Rp. 2.250	Rp. 750
	Pakaian Jadi (Perda.)	Rp. 5.000	Rp. 2.750
Jumlah			Rp. 5.000

Dengan kata lain bahwa nilai tambah dari pakaian jadi bersama-sama sektor perdagangan lainnya, serta nilai tambah produksi benang tekstil bersama-sama sektor industri lainnya dan nilai tambah produksi kapas bersama-sama dengan sektor pertanian lainnya, merupakan sumbangan sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (GDP) dan produk domestik regional (PDRB), pada periode tersebut.

Selain produksi barang-barang konsumsi atau barang-barang yang telah siap dikonsumsi konsumen terakhir, yang masuk dalam penghitungan produk domestik bruto/produk domestik regional bruto, maka ada pula produksi barang-barang yang belum siap dipakai oleh konsumen, melainkan dipakai untuk proses produksi selanjutnya. Barang-barang tersebut dinamakan barang-barang produksi penciptaannya investasi. Dimana investasi terdiri atas barang-barang



modal seperti bangunan-bangunan, mesin-mesin, persediaan bahan mentah, persediaan barang-barang setengah jadi dan persediaan barang-barang jadi.

Sebagian dari barang-barang modal atau investasi tersebut di atas yang dibuat pada masa lalu mengalami penyusutan pada tahun ini, baik karena dipakai maupun karena disimpan. Angka investasi yang diperoleh pada tahun ini masih mengandung angka penyusutan, oleh karena itu dinamakan produk domestik bruto/produk domestik regional bruto.

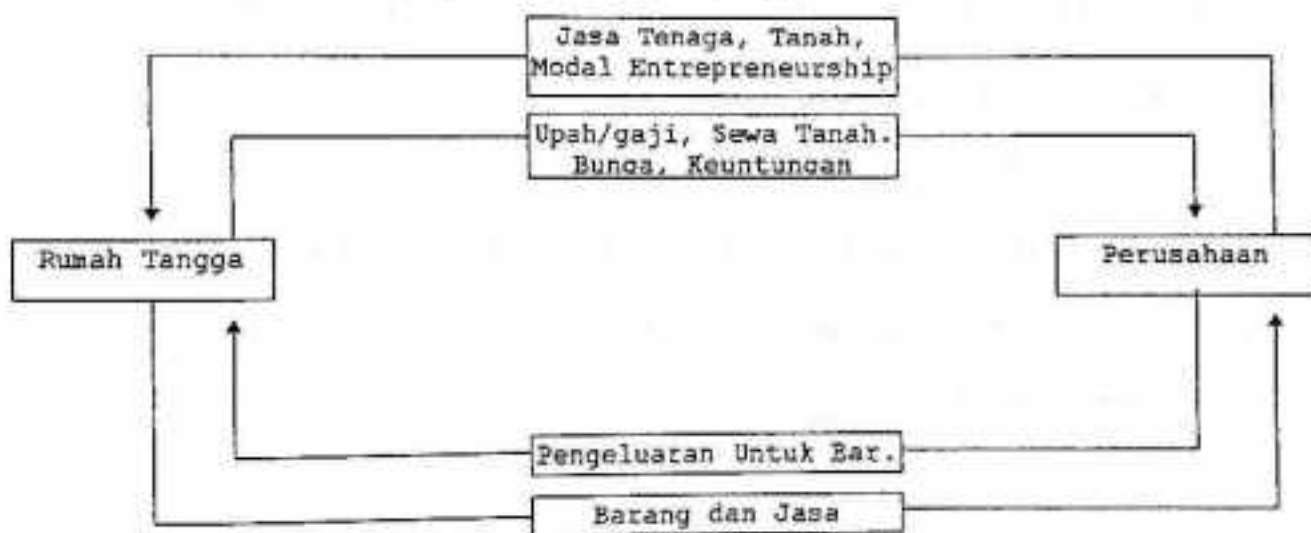
#### 3.4.4. Kesamaan dari Ketiga Metode Pendekatan Penghitungan

Meskipun yang dijabarkan lebih luas dalam penulisan ini adalah metode penghitungan melalui pendekatan produksi, tetapi karena hasil yang diperoleh apabila ketiga metode penghitungan tersebut dipakai harus sama, yakni produk domestik bruto/produk domestik regional bruto atas harga pasar, meskipun sumbernya masing-masing berlainan. Maka dalam urian berikut akan dijelaskan dimana letak persamaan dari ketiga metode penghitungan tersebut.

Secara sederhana tanpa memasukkan sektor pemerintah dan luar negeri, seperti yang terlihat pada gambar 3.2 bahwa pada aliran bawah adalah aliran barang dan jasa atau produksi nasional/produksi regional atas harga pasar yang dihitung berdasarkan produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan yang siap dikonsumsi oleh rumah tangga-rumah tangga. Metode penghitungan yang dipakai adalah metode penghitungan melalui pendekatan produksi. Sebaliknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga-rumah tangga untuk

mengonsumsi/membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, membentuk pendapatan nasional/pendapatan regional atas harga pasar yang dihitung berdasarkan metode penghitungan melalui pendekatan pengeluaran.

Gambar 3.2.  
Perputaran Perekonomian Yang Sederhana



Sementara aliran atas adalah aliran pendapatan yang kembali kepada masing-masing faktor-faktor produksi, tanah, modal, tenaga dan petindak sebagai sewa, bunga, gaji/upah dan keuntungan. Oleh karena pendapatan itu dikembalikan kepada pemilik faktor produksi, maka pendapatan nasional/pendapatan regional yang diperoleh dengan melalui pendapatan seperti yang diperoleh dengan pendapatan nasional/pendapatan regional atas biaya faktor, yang dihitung berdasarkan metode penghitungan melalui pendekatan pendapatan.



Dalam masyarakat modern, barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan, tidak dijual persis sama dengan biaya faktor produksi. Atas nama para pembeli, perusahaan-perusahaan membayar sejumlah pajak yang kemudian dibebankan kepada pembeli. Pajak ini dinamakan pajak tidak langsung. Dalam aliran sebelah bawah, sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sudah terkandung pajak tidak langsung didalamnya. Oleh karena itu aliran atas seharusnya ditambah dengan pajak tidak langsung, atau sebaliknya aliran bawah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Dengan demikian pendapatan nasional/regional atas biaya faktor produksi ditambah dengan pajak tidak langsung, sama dengan pendapatan nasional/regional atas harga pasar. Atau sebaliknya, pendapatan nasional/regional dikurang dengan pajak tidak langsung sama dengan pendapatan nasional/regional atas biaya faktor produksi.

#### 3.4.5. PDB/PDRB Atas Harga Berlaku dan PDB/PDRB Atas Harga Konstan

PDB/PDRB atas harga berlaku mengukur nilai keluaran atas output dalam satu periode tertentu dalam harga-harga pasar pada periode tersebut atau dikenal dengan istilah PDB/PDRB nominal. Jadi PDB/PDRB atas harga berlaku tahun 1983 mengukur nilai dari barang-barang yang diproduksi pada tahun tersebut dan pada harga pasar yang berlaku pada harga tahun tersebut.

Sedangkan PDB/PDRB atas harga konstan mengukur perubahan-perubahan output fisik dalam perekonomian antara periode waktu yang berbeda,

dengan cara menilai semua barang yang diproduksi didalam dua periode pada harga-harga yang sama atau sering disebut dengan istilah PDB/PDRB riil.

Karena adanya perubahan-perubahan harga dari tahun ke tahun, maka PDB/PDRB atas harga berlaku juga turut berubah dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu PDB/PDRB atas harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan daya beli sipenerima. Misalnya, seorang konsumen mengalami peningkatan pendapatan sebesar 20 persen, maka tidak dapat dikatakan bahwa daya beli konsumen tersebut meningkat 20 persen juga. Karena bisa jadi daya belinya justru menurun di bawah 20 persen, atau mungkin sama sekali tidak berubah. Ini semua tergantung dari perubahan harga pada kurun waktu tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan membandingkan daya beli yang diperoleh dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun, maka yang dipergunakan adalah PDB/PDRB atas harga konstan. Demikian pula apabila ingin membandingkan output atau keluaran pada tahun-tahun yang berbeda.

PDB/PDRB atas harga konstan atau PDB/PDRB riil diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PDB/PDRB Riil} = \text{PDB/PDRB Nominal} \times \frac{\text{IH Tm dasar}}{\text{IH Tm bersangkutan}} \quad (6)$$

dimana IH adalah Indeks Harga.

### 3.4.6. Manfaat Penghitungan dan Analisa Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional

Dengan mengetahui PDB/PDRB suatu negara atau daerah, maka dapat diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Dari perhitungan PDB/PDRB dapat diketahui struktur atau susunan perekonomian suatu negara atau daerah, misalnya apakah negara atau daerah tersebut negara atau daerah industri, pertanian atau jasa. Karena dari perhitungan PDB/PDRB dapat dilihat berapa besar peranan sektor industri, pertanian, jasa, pertambangan dan lain-lain. Dari perhitungan PDB/PDRB dapat diketahui bahwa negara Indonesia atau propinsi Sulawesi Selatan adalah negara atau daerah agraris. Disamping itu pula dapat diketahui kemana arah perekonomian negara atau daerah tersebut bergerak, berapa laju geraknya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Kegunaan yang kedua adalah dapat diperoleh perbandingan dari tahun ke tahun tentang PDB/PDRB itu sendiri, karena setiap tahun dilakukan penghitungan, apakah ada penurunan atau peningkatan, apakah ada perubahan struktur atau tidak, apakah ada penambahan atau pengurangan kemakmuran materil ditubungkan dengan jumlah penduduk, apakah ada kenaikan atau penurunan pendapatan perkapita.

3. Kegunaan ketiga yang dapat diperoleh dengan mengetahui PDB/PDRB adalah dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara atau daerah. Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh ketertinggalan atau kemajuan suatu negara atau daerah jika dibandingkan dengan negara lain atau daerah lain. Meskipun masih mengandung unsur subjektivitas karena disebabkan oleh beberapa hal seperti; tingkat harga dapat berbeda antar satu negara atau daerah, dengan kata lain bahwa daya beli uang dapat berbeda; peranan masing-masing barang bagi kehidupan sehari-hari antar satu negara atau daerah berbeda. Misalnya televisi, mobil, lemari es, daging merupakan barang biasa di negara-negara maju, tapi masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia.
4. Kegunaan yang keempat adalah dipergunakan untuk merumuskan kebijaksanaan pemerintah suatu negara atau daerah. Misalnya diinginkan pertumbuhan PDB/PDRB sebesar 8 persen, maka perhitungan inilah yang dilihat. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor, maka kenaikan 8 persen dapat dialokasikan kepada sektor pertanian, misalnya berapa persen sektor industri, berapa persen sektor yang lain dan seterusnya.

Hal lain bahwa dari kecepatan laju pertumbuhan sektor pertanian dalam sub sektor tanaman bahan makanan, pemerintah dapat menentukan kebijakan pengadaan pangan, apakah bahan makanan dapat disediakan oleh produksi dalam negeri atau harus diimpor. Dari pertumbuhan pendapatan

perkapita, dapat pula pemerintah memperoleh gambaran mengenai bagaimana seharusnya kebijaksanaan penduduk dan penggunaan dana investasi,

### 3.5. Hubungan Antara Tingkat Suku Bunga, Tabungan Dengan PDRB

Menurut Teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan dan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbangan antara permintaan dan penawaran dari pada investable fund yang bersumber dari tabungan.

Kaum klasik berpendapat bahwa, masyarakat melakukan penyesuaian pendapatannya yang sekarang dan akan datang dalam suatu cara yang memberikan kepuasan maksimum. Pengelolaan pendapatannya yang sekarang dengan pendapatan yang akan datang dilakukan dengan cara :

1. Memberi pinjaman dan meminjam.
2. Dengan menginvestasikan pendapatannya yang sekarang pada barang modal ataupun menbunganya.

Dengan demikian pasar modal terdiri dari banyak individu-individu yang melakukan tindakan serupa, maka keseimbangan terjadi pada saat tingkat suku bunga menyamakan jumlah pemberian pinjaman dengan jumlah pinjaman yang diinginkan. Atau dengan perkataan lain tabungan yang direncanakan akan sama dengan investasinya. Jika suatu waktu dana yang bersumber dari tabungan lebih besar dari pada yang dapat diserap oleh permintaan investasi pada tingkat bunga yang berlaku maka tingkat bunga akan menurun, demikian pula sebaliknya. Maka

tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan /mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.

Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai indikator kemakmuran suatu daerah. Pendapatan Domestik Regional Bruto yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian adalah cukup tersedia. Dengan banyaknya barang-barang dan jasa-jasa itu, jika lain-lain hal sama, berarti tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah adalah memadai.

Dalam pengukuran PDRB kita mengenal dua ukuran yaitu PDRB nominal dan PDRB Rill. PDRB nominal mengukur nilai keluaran harga-harga yang berlaku pada tahun keluaran (out put) itu diproduksi, sedangkan PDRB rill mengukur keluaran yang diproduksi dalam salah satu waktu pada harga-harga tahun dasar tertentu.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana hubungan PDRB dengan tingkat suku bunga (diasumsikan bahwa PDB sama dengan permintaan akan uang). Jadi PDRB sejalan dengan permintaan akan uang mempengaruhi tingkat suku bunga. Artinya jika PDRB meningkat berarti tingkat suku bungapun akan meningkat dan akan mempengaruhi jumlah tabungan.

Adanya kenaikan dari PDRB, akan mendorong permintaan uang (Klasik lebih menekankan pada motif transaksi yang besarnya tergantung dari pada PDRB)



naik, sebab masyarakat menginginkan uang kas yang lebih banyak untuk melakukan jumlah transaksi yang lebih besar. Implikasi dari ketergantungan permintaan akan uang atas pendapatan nasional ini adalah tingkat suku bunga akan berubah manakala terjadi perubahan pendapatan nasional, sebab perubahan pendapatan nasional akan mempengaruhi permintaan uang. Dengan jumlah uang yang tetap, berubahnya permintaan akan uang menyebabkan perubahan pada tingkat suku bunga, disisi lain tingginya tingkat suku bunga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menambah atau mengurangi jumlah tabungan.

## BAB IV

### PENGARUH DEREGULASI PERBANKAN TERHADAP MOBILISASI TABUNGAN MASYARAKAT

Kebijaksanaan moneter dan fiskal pada dasarnya ditujukan untuk memelihara dan mendorong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kestabilan ekonomi, termasuk kestabilan harga, tingkat bunga dan sebagainya menyangkut berbagai aspek dan kaitan berbagai variabel makro. Dari aspek kebijaksanaan moneter, berbagai variabel, alat-alat dan tindakan kebijaksanaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti kebijaksanaan supply uang, tingkat bunga perbankan serta kebijaksanaan moneter lainnya. Disamping itu kebijaksanaan fiskal, yaitu kebijaksanaan dibidang perpajakan, kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dan pendapatan negara, juga sangat berpengaruh di sini.

Salah satu kebijaksanaan moneter yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan di atas, adalah kebijaksanaan pagu kredit dan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah tanggal 9 April 1974. Melalui kebijaksanaan tersebut pemerintah ingin membatasi ekspansi kredit perbankan, sehingga dengan demikian tingkat inflasi yang terjadi akan menurun. Kebijakan ini ditujukan kepada bank-bank pemerintah karena pada waktu itu bank pemerintah menguasai hampir 90% kredit perbankan dan kemampuan bank pemerintah untuk melakukan ekspansi kredit pada saat itu sangat besar. Ini dapat terjadi karena kurang lebih 70% dari uang kuasi yang beredar yang merupakan salah satu sumber dana perbankan untuk melakukan ekspansi kredit, pada bank-bank pemerintah. Peraturan-peraturan lain yang terkandung dalam

kebijaksanaan tersebut antara lain terdiri dari peraturan yang mengatur cadangan wajib minimum perbankan, kredit likuiditas Bank Indonesia dan sebagainya.

Dengan adanya peraturan pagu kredit tersebut, maka jumlah kredit yang dapat diberikab bank pemerintah serta tingkat bunganya diatur langsung oleh pemerintah. Peraturan tingkat bunga kredit hanya berlaku untuk sektor-sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah dan bagi sektor-sektor yang tidak mendapat prioritas, tingkat bunganya dapat ditentukan secara bebas oleh setiap bank.

Adapun tujuan yang diinginkan ditetapkannya pagu kredit tersebut adalah meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah, karena tingkat bunga uang kuasi ditetapkan cukup rendah maka ia dapat menyebabkan turunya penawaran dana tabungan dan deposito berjangka (uang kuasi) dari masyarakat terhadap perbankan. Dengan kata lain jumlah kekayaan masyarakat yang dialokasikan dalam bentuk uang kuasi menurun.

Perlu diketahui bahwa tinggi rendahnya nilai riil suatu mata uang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Bila tingkat inflasi naik, maka nilai riil uang akan turun, demikian pula untuk sebaliknya. Untuk itu penulis mencoba melakukan pembahasan dalam lima bagian sebagai berikut.

#### 4.1. Perkembangan Tabungan Masyarakat

Dalam konteks penulisan ini, tabungan masyarakat yang dimaksudkan adalah tabungan yang terdiri dari deposito berjangka, Tabanas dan Taska.

Perkembangan deposito dan tabungan masyarakat dalam hal ini adalah tabanas dan taska di Sulawesi Selatan pada saat sebelum dan sesudah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 berlaku, yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan yang dialami oleh deposito sejak tahun 1980 sampai tahun

Tabel 4.1.  
Perkembangan Tabungan Dan Deposito  
Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995  
(Rp. Jutaan)

No.	Tahun	Deposito	Perentase	Tabungan	Perentase
1	1980	7,303		13,725	
2	1981	10,107	27.74	18,237	24.74
3	1982	13,698	26.22	21,628	15.68
4	1983	20,567	33.40	25,456	15.04
5	1984	34,675	40.69	31,630	19.52
6	1985	65,042	46.69	43,259	26.88
7	1986	83,120	21.75	66,384	34.84
8	1987	124,875	33.44	78,034	14.93
9	1988	153,553	28.68	101,946	23.46
10	1989	238824	35.70	179566	43.23
11	1990	316580	24.56	242194	25.86
12	1991	494570	35.99	449005	46.06
13	1992	571972	13.53	654179	31.36
14	1993	608605	6.02	850168	23.05
15	1994	697333	12.72	1022475	16.85
16	1995	794499	12.23	1231177	16.95

Sumber: Bank Indonesia Cabang Djungpandang

1995 cukup besar, yakni meningkat sebesar 389,35 persen atau sekitar 787,19 milyar, sementara peningkatan rata-ratanya pertahun adalah sebesar 25,96 persen atau sekitar 264,71 milyar.

Dari peningkatan tersebut dapat juga dilihat, bahwa peningkatan yang dialami sesudah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 jauh lebih besar dibanding dengan sebelum kebijaksanaan tersebut berlaku, yakni bahwa peningkatan yang dialami setelah adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan yakni dari tahun 1983 sampai tahun 1988 adalah sebesar 86,60 persen atau sekitar 132,98 milyar, dan peningkatan rata-ratanya pertahun adalah sebesar 32,24 persen atau meningkat sekitar 25,89 milyar pertahun. Sedangkan peningkatan yang dialami sebelum berlakunya kebijaksanaan tersebut yakni tahun 1980 sampai tahun 1982 hanya sebesar 46,02 persen atau meningkat sekitar 6,3 milyar selama periode tersebut. Sementara peningkatan rata-ratanya pertahun sebesar 25,96 persen atau rata-rata meningkat sekitar 264,71 milyar pertahun. Selanjutnya saat dibelakukannya kebijaksanaan deregulasi perbankan tanggal 27 Oktober 1988, maka peningkatan jumlah deposito pada tahun 1988 hanya berkisar 18,68 persen dimana sebelumnya yakni tahun 1987 peningkatannya mencapai 33,44 persen, jadi deposito mengalami penurunan. Dan pada tahun 1989 mengalami peningkatan sebesar 35,99 persen setelah diberlakukan kebijaksanaan deregulasi sampai tahun 1993 kondisi deposito mengalami penurunan hingga mencapai 6,02 persen. Dan pada tahun 1993 pemerintah memberlakukan kebijaksanaan deregulasi dibidang



perbankan pada tanggal 29 Mei 1993 mengakibatkan jumlah deposito mengalami peningkatan kembali menjadi 12,72 persen atau sebesar 88,73 milyar.

Dari tahun 1980 sampai tahun 1995 deposito mengalami peningkatan yang cukup pesat, begitu pula dialami oleh tabungan dalam hal ini tabanas dan taska. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut diatas bahwa peningkatan yang dialami yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 adalah 5.029,06 milyar atau total peningkatan yang dialami selama periode tersebut adalah 5.029,06 milyar, dengan peningkatan rata-rata yang dialami pertahun adalah sebesar 25,23 persen meningkat sebesar 314,32 milyar pertahun.

Total peningkatan yang dialami sesudah kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 juga lebih besar dibandingkan dengan total peningkatan yang dialami sebelum kebijaksanaan tersebut berlaku, yakni pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku, total peningkatan yang dialami yaitu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 hanya sekitar 15,40 milyar atau meningkat sebesar 71,22 persen, dengan peningkatan rata-rata pertahun adalah sekitar 2,84 milyar atau rata-rata meningkat sebesar 21,94 persen pertahun. Sedangkan total peningkatan yang dialami sesudah kebijaksanaan tersebut berlaku yakni dari tahun 1983 sampai tahun 1995 adalah sekitar 9.264,39 milyar atau meningkat sebesar 573,12 persen, dengan rata-rata peningkatan pertahun adalah sekitar 2.004,65 milyar atau rata-rata meningkat sekitar 38,21 persen setiap tahun.

Dari peningkatan tabungan secara keseluruhan tersebut di atas, dapat dilihat tingkat perkembangannya secara terpisah, yakni perkembangan tabanas dan

taska, baik dari sisi perkembangan penabung maupun dari sisi perkembangan nilainya, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa total peningkatan penabung pada tabanas dari tahun 1980 sampai tahun 1995 adalah sebesar 77,45 persen atau meningkat sebesar 1.316,9 ribu penabung, yakni dari 383,35 ribu penabung pada tahun 1980 meningkat menjadi 1.700,25 ribu penabung pada tahun 1995, sedangkan nilainya nilainya mengalami peningkatan sebesar 1.095,20 milyar atau meningkat 98,96 persen, yaitu 11.509 milyar pada tahun 1980 meningkat menjadi 1.106.705 milyar pada tahun 1995.

Tabel 4.2  
Perkembangan Tabanas dan Taska  
Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995  
(Rp. Jutaan)

No.	Tahun	Tabanas		Taska	
		Penabung	Milai	Penabung	Milai
1	1980	383,352	11,509	226	2
2	1981	428,158	16,160	311	1
3	1982	461,973	18,655	509	6
4	1983	488,451	21,500	669	7
5	1984	562,071	26,067	169	5
6	1985	633,400	36,529	176	6
7	1986	679,314	51,111	101	6
8	1987	708,354	56,628	102	7
9	1988	711,410	62,474	75	6
10	1989	975,722	127,310	93	6
11	1990	1,439,629	296,560	100	7
12	1991	1,269,937	462,567	97	8
13	1992	1,356,008	706,218	84	7
14	1993	1,518,614	917,609	79	6
15	1994	1,603,853	1,036,205	69	5
16	1995	1,700,252	1,106,705	65	7

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujungpandang

Dari peningkatan tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penabung tabanas pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 belum berlaku, yakni dari

tahun 1980 sampai dengan 1982 meningkat sebesar 34,62 persen atau meningkat sebanyak 78,62 ribu, yakni dari 383,35 ribu penabung pada tahun 1980 meningkat menjadi 641,97 ribu penabung pada tahun 1982, sedangkan peningkatan nilainya sebesar 40 persen atau meningkat sebesar 7,15 milyar, yakni meningkat dari 11,5 milyar pada tahun 1980 menjadi 18,66 milyar pada tahun 1982. Pada saat kebijaksanaan tersebut telah berlaku, yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995, terlihat bahwa jumlah penabung mengalami peningkatan sebesar 71,27 persen, atau meningkat sebanyak 1.211,8 ribu penabung, yaitu dari 488,45 ribu penabung pada tahun 1983 meningkat menjadi 1.700,25 ribu penabung pada tahun 1995. Sedangkan nilainya meningkat sebesar 98,06 persen, atau meningkat sebesar 1.085,21 milyar, yaitu dari 21,5 milyar pada tahun 1983 meningkat menjadi 1.106,71 milyar pada tahun 1995.

Dari tabel tersebut, dapat juga dibandingkan total jumlah penabung dan jumlah nilai tabungan pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 belum berlaku dan sesudah kebijaksanaan deregulasi perbankan tersebut berlaku, selama masa tahun pengamatan, yakni antara periode 1980 sampai dengan periode 1982 dengan periode 1983 sampai dengan periode 1995. Pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku total jumlah penabung adalah sebanyak 78,6 ribu penabung dan total nilai dari tabungan tersebut sebesar 7,15 milyar, sedangkan setelah kebijaksanaan tersebut berlaku total jumlah penabung adalah sebanyak 1,24 juta penabung dan total nilai dari tabungan tersebut adalah sebesar 1.085,2 milyar.



Sementara Taska, terlihat justru mengalami penurunan pada jumlah penabungnya, yakni turun sekitar 247,7 persen atau berkurang sekitar 161 penabung selama tahun pengamatan, yaitu dari 226 penabung pada tahun 1980 turun menjadi 65 penabung pada tahun 1995. Meskipun jumlah penabung pada taska mengalami penurunan selama periode tersebut, tetapi terlihat bahwa nilai tabungan dari taska tetap mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Peningkatan yang dialami yakni dari 2 juta pada tahun 1980 meningkat menjadi 7 juta pada tahun 1995, atau meningkat sebesar 71,43 persen atau sebesar 5 juta.

Penurunan jumlah penabung pada taska terlihat terjadi setelah berlakunya kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983, yaitu sejak tahun 1984, yakni menurun dari 669 penabung pada tahun 1983 menjadi 65 penabung pada tahun 1995, atau mengalami penurunan sebesar 775,4 persen atau turun sebanyak 504 penabung. Sementara pada saat kebijaksanaan tersebut belum berlaku terlihat bahwa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 mengalami peningkatan sebesar 55,6 persen atau peningkat sebanyak 283 penabung, yaitu dari 226 penabung pada tahun 1980 meningkat menjadi 509 penabung pada tahun 1982.

Peningkatan pada nilai tabungan taska terjadi pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 belum berlaku, yakni pada periode 1980 sampai dengan 1982, pada periode tersebut nilai dari tabungan taska meningkat sebesar 66,7 persen atau meningkat sebesar 4 juta, yakni dari 2 juta pada tahun 1980 meningkat menjadi 6 juta pada tahun 1982, sementara setelah kebijaksanaan

tersebut berlaku, nilai dari tabungan taska seperti pada tabel 4.2. memperlihatkan fluktuasi, hingga tahun 1995 nilai dari tabungan taska menjadi sebesar 7 juta.

Sementara perkembangan tabungan masyarakat secara keseluruhan, baik deposito maupun tabungan dalam hal ini adalah tabanas dan taska dapat dilihat pada tabel 4.3. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perkembangan yang dialami oleh tabungan selama masa tahun pengamatan yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar 98,96 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2.004,65 milyar, yakni dari 21,03 milyar pada tahun 1980 meningkat menjadi 2.025,68 milyar pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 25,78 persen, atau rata-rata meningkat sebesar 133,64 milyar setiap tahun. Dari peningkatan ini, terlihat bahwa peningkatan yang dialami pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku adalah sebesar 40,47 persen atau meningkat sebesar 14,3 milyar, yaitu dari 21,03 milyar pada tahun 1980 meningkat menjadi 35,3 milyar pada tahun 1982, dengan rata-rata peningkatan per-tahun adalah sebesar 22,79 persen, atau rata-rata meningkat sebesar 14,3 milyar per-tahun. Sedang pada saat kebijaksanaan tersebut telah berlaku, peningkatan yang dialami adalah sebesar 97,73 persen atau meningkat sebesar 1.979,65 milyar, yakni dari 46,02 milyar pada tahun 1983 meningkat menjadi 2.025,68 milyar pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata pertahunnya adalah sebesar 97,73 persen atau rata-rata meningkat sebesar 1.979,65 milyar setiap tahun.



Tabel 4.3  
Perkembangan Tabungan Masyarakat  
(Deposito, tabanas dan taska)  
Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995  
(Rp. Jutaan)

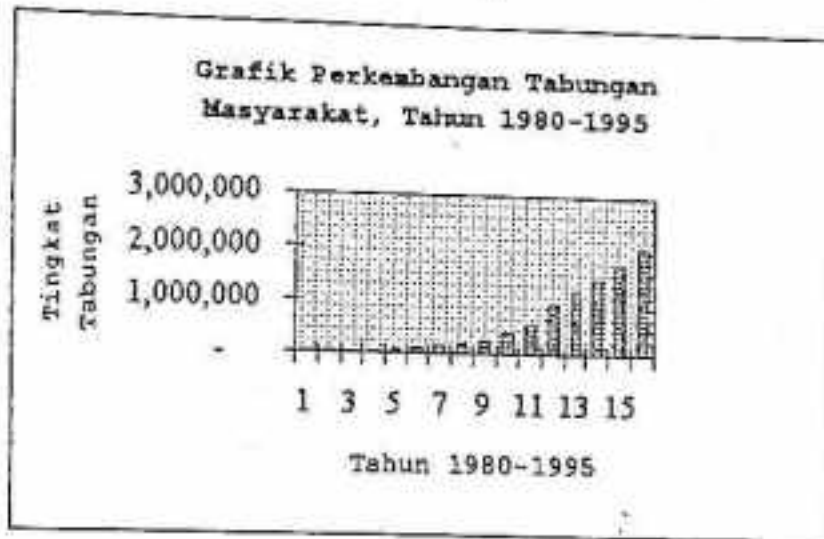
No.	Tahun	Tabungan Masyarakat	Persentase
1	1980	21,028	
2	1981	28,344	25.81
3	1982	35,326	19.76
4	1983	46,023	23.24
5	1984	66,303	30.59
6	1985	108,301	38.78
7	1986	149,968	27.78
8	1987	202,909	26.09
9	1988	255,499	20.58
10	1989	418,390	38.93
11	1990	558,774	25.12
12	1991	943,575	40.78
13	1992	1,226,151	23.05
14	1993	1,458,773	15.95
15	1994	1,719,808	15.18
16	1995	2,025,676	15.10

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujungpendang

Dari tabel tersebut, dapat juga dilihat bahwa total jumlah tabungan pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku, yakni dari tahun 1980 sampai tahun 1982 adalah sebesar 84,70 milyar dan pada saat kebijaksanaan tersebut telah berlaku yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar 9.180,15 milyar.

Perkembangan tabungan tersebut di atas dapat juga dilihat secara grafik pada gambar 4.1.

Gambar 4.1



#### 4.2. Keadaan PDRB Sulawesi Selatan

Untuk menganalisa pengaruh pendapatan terhadap perkembangan tabungan masyarakat, maka pendapatan yang paling erat hubungannya dalam hal ini, adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau *disposable income*, yakni pendapat-pendapatan rumah tangga yang terbentuk sebelum dikurangi pajak, tetapi karena data *disposable income* tidak tersedia secara sekunder, maka penulis menggunakan data pendapatan domestik regional bruto, yakni pendapatan yang terbentuk sebelum dikurangi dengan penyusutan dan pajak tidak langsung.

Sebelum menganalisa pengaruh pendapatan domestik regional bruto terhadap tingkat perkembangan tabungan masyarakat, maka terlebih dahulu akan dilihat perkembangan pendapatan domestik regional bruto ini, baik pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 belum berlaku maupun pada saat kebijaksanaan tersebut sudah berlaku. Untuk itu, dari tabel 4.4 terlihat bahwa

perkembangan yang dialami oleh pendapatan domestik regional bruto Sulawesi Selatan sejak tahun pengamatan yakni, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar 72,89 persen atau meningkat sebesar 2,86 trilyun, yakni dari 1.063,31 milyar pada tahun 1980 meningkat

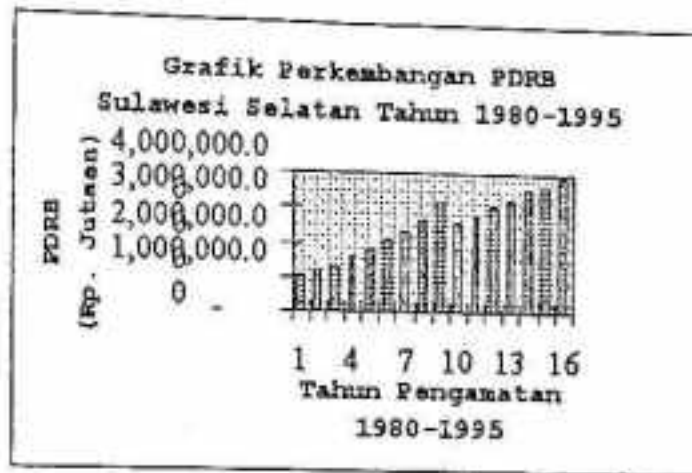
Tabel 4.4  
Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto  
(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1980-1993  
Di Sulawesi Selatan Tahun 1980-1995  
(Rp. Jutaan)

No.	Tahun	PDRB (atas harga berlaku)	Persentase (%)
1	1980	1,063,312.61	
2	1981	1,177,089.24	9.67
3	1982	1,262,884.13	6.79
4	1983	1,569,530.79	19.54
5	1984	1,795,588.75	12.59
6	1985	2,079,773.11	13.66
7	1986	2,363,052.15	11.99
8	1987	2,637,244.85	10.40
9	1988	3,219,593.98	18.09
10	1989	2,608,664.64	-23.42
11	1990	2,786,604.49	6.39
12	1991	3,049,868.12	8.63
13	1992	3,286,072.44	7.19
14	1993	3,539,804.63	7.17
15	1994	3,608,444.73	1.90
16	1995	3,922,008.09	7.99

Sumber: Biro Pusat Statistik

menjadi 3,92 trilyun pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahunnya adalah sebesar 7,9 persen atau rata-rata meningkat sebesar 190,58 milyar setiap tahun.

Gambar 4.2



Dari peningkatan tersebut, peningkatan yang dialami pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 adalah sebesar 15,8 persen atau meningkat sebesar 199,57 milyar, yakni dari 1,06 trilyun pada tahun 1980 meningkat menjadi 1,26 trilyun pada tahun 1982, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 1,17 trilyun setiap tahun. Sedangkan pada saat kebijaksanaan tersebut telah berlaku yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995, peningkatan yang dialami adalah sebesar 59,98 persen atau meningkat sebesar 2,35 trilyun, yakni dari 1,57 trilyun pada tahun 1983 meningkat menjadi 3,92 trilyun pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 7,86 persen atau rata-rata meningkat sebesar 204,55 milyar setiap tahun.

Di sisi lain dapat pula dibandingkan antara total pendapatan domestik bruto pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan tahun 1983 belum berlaku yakni dari tahun 1980 sampai tahun 1982 dan saat deregulasi perbankan tersebut berlaku yakni dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995. Terlihat bahwa total

pendapatan domestik regional bruto pada saat deregulasi perbankan tahun 1983 belum berlaku adalah sebesar 3,5 trilyun dan pada saat deregulasi perbankan tersebut berlaku adalah sebesar 36,47 trilyun.

Perkembangan dari pendapatan domestik regional bruto tersebut di atas dapat juga dilihat secara grafik pada gambar 4.2.

#### 4.3. Tingkat Suku Bunga Bank Dalam Era Deregulasi

Kebijaksanaan deregulasi perbankan yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1983 telah mendorong bank-bank pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya bersaing terhadap bank-bank swasta nasional. Usaha ini dapat dilihat dari meningkatnya suku bunga deposito berjangka untuk semua jangka waktu. Suku bunga deposito yang berjangka waktu 12 bulan sebagaimana dapat terlihat dalam tabel 4.5. Meningkat hampir 50 persen yaitu dari 9,00 persen pada tahun 1982 menjadi 17,50 persen pada tahun 1983. Sementara itu suku bunga deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank-bank swasta nasional tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun bank-bank pemerintah telah meningkatkan tingkat suku bunganya pada tingkat yang lebih menyaingi bank-bank swasta nasional segera setelah diberlakukannya kebijaksanaan tersebut, akan tetapi secara keseluruhan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing untuk jangka waktu tersebut masih lebih tinggi. Walaupun demikian pada dasarnya tingkat suku bunga pada bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing bergerak dalam suatu pola yang sama.

Sementara itu tingkat suku bunga deposito untuk jangka waktu 12 bulan pada bank-bank pemerintah mengalami peningkatan besar, hampir 50 persen yaitu 17,5 persen pada tahun 1983. Perkembangan tingkat suku bunga pada bank-bank pemerintah untuk deposito jangka 12 bulan tersebut, selanjutnya memperlihatkan bahwa meskipun tingkat suku bunga yang ditetapkan masih di bawah tingkat suku bunga yang berlaku di bawah bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing, akan tetapi perbedaan yang ada semakin kecil. Jika pada tahun 1982 perbedaan tersebut mencapai 10,3 poin, maka dalam tahun 1983 perbedaan tersebut dengan bank-bank swasta nasional berkisar 2,7 poin selanjutnya pada tahun 1985 dan 1986 tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga baik bank pemerintah maupun bank swasta nasional mengalami penurunan dari 18,70 persen pada tahun 1984 menjadi 17,80 persen pada tahun 1985 dan 15,2 persen pada tahun 1986 untuk bank-bank pemerintah, sedangkan penurunan yang terjadi pada bank-bank swasta nasional dari 20,4 persen pada tahun 1984 menjadi 17,80 persen pada tahun 1985 dan 15,2 persen pada tahun 1986.

Selanjutnya perkembangan tingkat suku bunga bank pada bank-bank pemerintah mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 1992, dimana selama tahun penganatan yakni tahun 1980 sampai dengan tahun 1995, maka pada tahun inilah tingkat suku bunga bank, dalam hal ini tingkat suku bunga bank-bank pemerintah mencapai poin paling tinggi yakni 21,32 persen, setelah itu tingkat suku bunga mengalami penurunan secara terus menerus sampai pada poin 14,29 persen pada tahun 1995 seperti terlihat pada tabel 4.5.

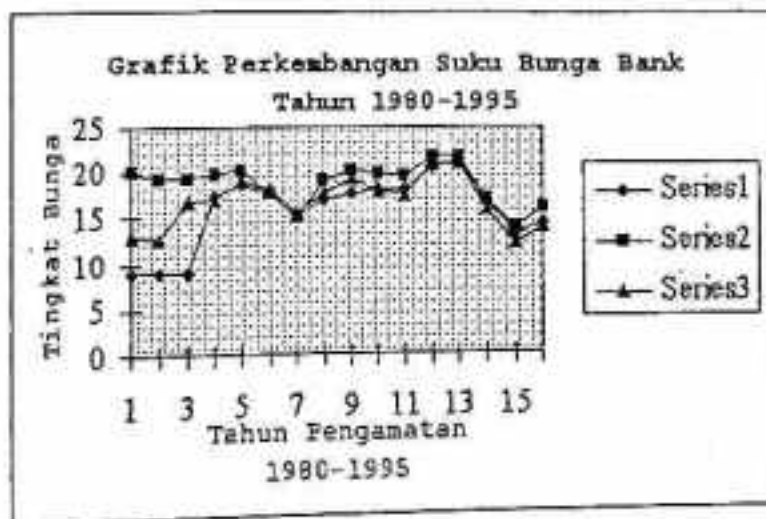


Tabel 4.5  
Perkembangan Tingkat Suku Bunga  
Deposito Berjangka 12 Bulan  
(Persen Per Tahun)

No.	Tahun	Bank Pemerintah	Bank Swasta Nasional	Bank Asing
1	1980	8.9	20.1	12.9
2	1981	9	19.40	12.80
3	1982	9	19.30	16.70
4	1983	17.50	19.70	17.00
5	1984	18.70	20.40	19.10
6	1985	17.80	17.80	18.10
7	1986	15.20	15.20	15.60
8	1987	16.99	19.11	17.76
9	1988	17.76	20.21	19.42
10	1989	18.12	19.73	18.02
11	1990	18.12	19.59	17.50
12	1991	20.47	21.75	20.96
13	1992	21.32	21.69	20.90
14	1993	16.81	17.08	15.73
15	1994	13.18	14.03	12.13
16	1995	14.29	15.99	13.94

Sumber: Biro Pusat Statistik

Gambar 4.3



Untuk mengamati perkembangan tingkat suku bunga bank, baik tingkat suku bunga pada bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional maupun bank-bank asing, dapat dilihat secara grafik dalam gambar 4.3.

#### 4.4. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Sulawesi Selatan

Dari uraian terdahulu memberikan gambaran bahwa kebijaksanaan deregulasi perbankan tahun 1983 memberikan dampak terhadap minat masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana kepada bank, mulai dari masyarakat perkotaan sampai kepada masyarakat pedesaan. Maka salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak dunia perbankan adalah memperluas jangkauan, dalam hal ini jumlah kantor bank harus ditambah dan bahkan jaringannya pun harus diperluas sampai ke pedesaan.

Tabel 4.6  
Perkembangan Kantor Bank  
Di Sulawesi Selatan  
Tahun 1980-1995

No.	Tahun	Kantor Bank	Jumlah Bank
1	1980	86	26
2	1981	89	28
3	1982	93	28
4	1983	120	31
5	1984	124	30
6	1985	137	30
7	1986	139	29
8	1987	158	29
9	1988	205	30
10	1989	241	32
11	1990	257	37
12	1991	270	40
13	1992	280	42
14	1993	309	42
15	1994	323	53
16	1995	356	53

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujungpandang

Pengembangan jumlah bank dan kantor merupakan salah satu pendorong bagi masyarakat untuk menabung selain motif harapan untuk mendapatkan bunga dan jaminan keamanan uang.

Perkembangan jumlah kantor bank di Sulawesi Selatan selama tahun pengamatan yakni tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Dari tabel 4.6, terlihat perkembangan yang dialami oleh jumlah kantor bank di Sulawesi Selatan adalah sebesar 75,84 persen atau meningkat sebesar, 270 kantor bank, yakni 86 kantor bank pada tahun 1980 meningkat menjadi 356 kantor bank pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahunnya adalah sebesar 8,79 persen atau meningkat rata-rata 18 kantor bank setiap tahun.

Dari peningkatan tersebut, peningkatan jumlah kantor bank yang dialami pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 adalah sebesar 7,53 persen atau meningkat sebesar 7 kantor bank, yakni dari 86 kantor bank pada tahun 1980 meningkat menjadi 93 kantor bank pada tahun 1982, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 10,06 persen setiap tahun. Sedangkan pada saat kebijaksanaan tersebut telah berlaku yakni dari tahun 1983 samapai dengan tahun 1995, peningkatan yang dialami adalah sebesar 66,3 persen atau meningkat sebesar 236 kantor bank, yakni dari 120 kantor bank pada tahun 1983 meningkat menjadi 356 kantor bank pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 9,55 persen setiap tahun.

#### 4.5. Hasil Kajian Dampak Deregulasi Terhadap Tabungan

Dalam bab ini akan disajikan pembahasan mengenai hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya (bab I), yaitu bahwa tabungan masyarakat akan dapat ditingkatkan bilamana peningkatan pendapatan masyarakat diikuti pula dengan peningkatan suku bunga sektor perbankan sebagai peransang daya tarik masyarakat untuk menabung selama masa observasi (1980-1995).

Dengan menggunakan data time series (deret waktu) selama periode 1980 sampai tahun 1995, dalam melakukan perhitungan (pengujian) empirik terhadap model persamaan yang diterapkan, penulis menggunakan variabel-variabel : *Tingkat tabungan* yang merupakan *variabel terikat (dependen variabel)*, *tingkat pendapatan domestik regional bruto*, *tingkat suku bunga*, dan *peningkatan jumlah kantor bank* yang merupakan *variabel bebas (independen variabel)*.

Untuk keperluan penaksiran model persamaan regresi, digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Perhitungan analisa regresi dengan menggunakan jasa komputasi secara terpisah baik sebelum maupun sesudah deregulasi perbankan berlaku, dengan memasukkan kebijakan deregulasi sebagai variabel dummy (D).

Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan secara terpisah berdasarkan dengan data pada tabel 4.7 yakni pada saat kebijaksanaan deregulasi perbankan belum dimasukkan dan pada saat kebijaksanaan tersebut sudah

dimasukkan dalam hal ini antara tahun 1980 - 1995. Apabila dinyatakan dalam model maka didapatkan formula sebagai berikut :

1. Sebelum deregulasi perbankan dimasukkan atau variabel dummy belum dimasukkan dalam perhitungan adalah sebagai berikut :

$$Y = -260399,5111 + 0,0050 X_1 + 43392,8580 X_2 + 7723,8844 X_3 \dots (7)$$

(-0,026)	(-2,618)	(4,190)
212209,1689	(S <sub>e</sub> )	
0,9212	(r <sup>2</sup> )	
0,9598	(r)	



Intrepretasi dari hasil analisa regresi pada persamaan (7) tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Besarnya pengaruh variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> terhadap variabel Y adalah ditunjukkan oleh nilai parameter (intercept) b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> dan b<sub>3</sub> adalah -0,0050, -43392,8580 dan 7723,8844. Atau dengan kata lain bahwa besarnya pengaruh PDRB, Bunga Bank dan Jumlah Kantor Bank adalah ditunjukkan oleh nilai parameter. Dalam artian bahwa jika PDRB meningkat Rp.1.000.000,- maka diharapkan akan meningkatkan tabungan masyarakat sebesar Rp.500,- atau 0,5 persen, dan peningkatan suku bunga bank 1 point diharapkan pula akan meningkatkan jumlah tabungan masyarakat sebesar Rp.43392,-, begitupun jumlah kantor bank berpengaruh sebesar Rp.7723,- terhadap jumlah tabungan per 1 unitnya.

Dari hasil yang didapatkan pada koefisien korelasi ( r ), diketahui bahwa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat sebelum kebijaksanaan

deregulasi perbankan dimasukkan adalah sebesar 0,9598, dan dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebelum dimasukkannya kebijaksanaan deregulasi perbankan/variabel dummy adalah positif.

Hasil dari koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebelum dimasukkannya kebijaksanaan deregulasi perbankan adalah sebesar 0,9212. Hal ini berarti bahwa sumbangan dari PDRB, Tingkat Suku Bunga dan Peningkatan Jumlah Kantor Bank terhadap fluktuasi (naik turunnya) tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan sebelum deregulasi perbankan dimasukkan adalah sebesar 92 persen sedang sisanya sebesar 8 persen disebabkan oleh faktor-faktor non ekonomik yang ada di luar model regresi ini.

Tabel 4.7  
Perkembangan Tabungan, PDRB, Tingkat Suku Bunga,  
Jumlah Kantor Bank Di Sulawesi Selatan  
Tahun 1980-1995

No.	Tahun	Tabungan Y	PDRB X <sub>1</sub>	Suku Bunga X <sub>2</sub>	Kantor Bank X <sub>3</sub>	Paket 83 D1	Paket 88 D2	Paket 93 D3
1	1980	21,028	1,063,312.61	8.90	86	0	0	0
2	1981	28,344	1,177,089.24	9.00	89	0	0	0
3	1982	35,326	1,262,884.13	9.00	93	0	0	0
4	1983	46,023	1,569,530.79	17.50	120	1	0	0
5	1984	66,303	1,795,588.75	18.70	124	1	0	0
6	1985	108,301	2,079,773.11	17.80	137	1	0	0
7	1986	149,968	2,363,052.15	15.20	139	1	0	0
8	1987	202,909	2,637,244.85	16.99	158	1	0	0
9	1988	255,499	3,219,593.98	17.76	205	0	1	0
10	1989	418,390	2,608,664.64	18.12	241	0	1	0
11	1990	558,774	2,786,604.49	18.12	257	0	1	0
12	1991	943,575	3,049,868.12	20.47	270	0	1	0
13	1992	1,226,151	3,286,072.44	21.32	280	0	1	0
14	1993	1,458,773	3,539,804.63	16.81	309	0	0	1
15	1994	1,719,808	3,608,444.73	13.18	323	0	0	1
16	1995	2,025,676	3,922,008.09	14.29	356	0	0	1

Sumber data : Bank Indonesia dan BPS Sulawesi Selatan, dikumpul dari berbagai edisi dan diolah pada tahun 1997

2. Sesudah deregulasi perbankan hasil perhibungan yang diperoleh berdasarkan tabel 4.7 dengan memasukkan kebijaksanaan deregulasi sebagai variabel dummy apabila dinyatakan dalam formula baru sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y = & 1267179,6390 + 0,0739 X_1 + 38128,7142 X_2 + 9707,5409 X_3 - \\
 & \quad (0,1320) \quad (1,446) \quad (4,973) \\
 & 746140,9912 D_1 - 1436546,9356 D_2 - 1030625,9817 D_3 \text{-----} (8) \\
 & \quad (-2,856) \quad (-3,817) \quad (-2,365) \\
 & \quad 123107,0223 (S_e) \\
 & \quad 0,9801 (r^2) \\
 & \quad 0,9900 (r)
 \end{aligned}$$

Sebelum menguraikan arti dari hasil analisa regresi pada formula (8) tersebut di atas, maka terlebih dahulu diasumsikan bahwa kebijaksanaan deregulasi perbankan tidak berpengaruh terhadap "*marginal propensity to save*" (MPS), akan tetapi hanya berpengaruh pada "*average propensity to save*" (APS).<sup>20</sup> Dalam pengertian, bahwa koefisien arah (slope) atau koefisien regresi dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  yang disimbolkan dengan  $b_1$ ,  $b_2$  dan  $b_3$  adalah sama baik sebelum maupun sesudah berlakunya kebijaksanaan deregulasi perbankan.

Hal tersebut di atas dilakukan karena selain tingkat tabungan dipengaruhi oleh PDRB, Bunga dan Jumlah kantor bank, variabel yang bersifat kuantitatif Juga dipengaruhi oleh paket kebijaksanaan deregulasi perbankan tahun, 1983, 1988 dan 1993, yang merupakan variabel bersifat kualitatif Dengan perkataan lain bahwa dengan sekali meregresi, sudah didapatkan kondisi pada saat

<sup>20</sup> J. Supranto, "Ekonometrik", Buku Dua, Jakarta : LPFE-VI, 1984, hal 204

kebijaksanaan deregulasi perbankan belum berlaku dan pada saat kebijaksanaan tersebut sudah berlaku.



Dengan demikian, hasil dari formula (8) tersebut di atas dapat diinterpretasi sebagai berikut :

Besarnya pengaruh variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan oleh nilai dari masing-masing parameter  $b_1$ ,  $b_2$  dan  $b_3$  yakni sebesar 0,0739, 38128,7142 dan 9707,5409. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan PDRB sebesar Rp.1.000.000,- maka diharapkan akan mendorong tingkat tabungan masyarakat 7,39 persen atau sebesar Rp.73.900,- .

Untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan atau tidak, maka digunakan ukuran koefisien korelasi ( $r$ ) dan koefisien determinasi ( $r^2$ ). Pengujian tersebut untuk mengetahui hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien korelasi ( $r$ ), yakni sebesar 0,9900 atau 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat sesuai dengan formula yang digunakan adalah cukup kuat (cukup erat), koefisien determinasi yang diperoleh ( $r^2$ ) adalah sebesar 0,9801 atau 98,01 persen, memberikan arti bawa fluktuasi (naik turunnya) tingkat variabel terikat sebanyak 98,01 persen ditentukan oleh variabel-variabel bebas, dengan perkataan lain bahwa naik turunnya tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan, 98,01 persen ditentukan oleh tingkat PDRB, tingkat suku bunga bank dan jumlah kantor



bank, sedangkan sisanya 1,99 persen disebabkan oleh faktor non ekonomik lainnya yang berada diluar formula regresi.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil studi empirik tentang pengaruh kebijaksanaan deregulasi perbankan dalam mendorong peningkatan tabungan masyarakat, dari bahasan yang telah dianalisa sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan deregulasi perbankan, telah memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan. Selama masa tahun pengamatan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995, hal ini dapat terlihat dari perkembangan tabungan masyarakat secara keseluruhan, baik deposito maupun tabungan, terlihat bahwa perkembangan yang dialami oleh tabungan selama masa tahun pengamatan yakni dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar 98,96 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2.004,65 milyar, yakni dari 21,03 milyar pada tahun 1980 meningkat menjadi 2.025,68 milyar pada tahun 1995, dengan peningkatan rata-rata per-tahun adalah sebesar 25,78 persen, atau rata-rata meningkat sebesar 133,64 milyar setiap tahun.
2. Keberhasilan pelaksanaan deregulasi perbankan yang diberlakukan oleh pemerintah, menurut hemat penulis dapat terjadi karena hal itu didukung oleh kemampuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini aparat perbankan maupun lainnya dalam mengantisipasi berbagai gejolak yang

mungkin saja mempengaruhi hasil kebijaksanaan tersebut ke arah yang negatif (menghambat peningkatan tabungan masyarakat).

3. Keadaan di atas didukung oleh hasil analisis regresi yang memberikan gambaran bahwa setelah kebijaksanaan deregulasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara pendapatan domestik regional bruto (variabel bebas) dengan tabungan masyarakat, terdapat hubungan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka marginal propensity to save sebesar 0,0739 atau koefisien regresinya sama dengan 0,0739. Begitupun dengan tingkat suku bunga dan jumlah kantor bank, bahkan peningkatannya sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah tabungan masyarakat.
4. Pengujian lain berupa angka-angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Hasilnya memperlihatkan angka pada koefisien korelasi ( $r$ ), diketahui bahwa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat sebelum kebijaksanaan deregulasi perbankan dimasukkan adalah sebesar 0,9598, dan dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebelum dimasukkannya kebijaksanaan deregulasi perbankan/variabel dummy adalah positif. Dan hasil dari koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebelum dimasukkannya kebijaksanaan deregulasi perbankan adalah sebesar 0,9212. Hal ini berarti bahwa sumbangan dari PDRB, Tingkat Suku Bunga dan Peningkatan Jumlah Kantor Bank terhadap fluktuasi (naik turunnya) tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan sebelum deregulasi perbankan dimasukkan adalah sebesar 92 persen sedang sisanya sebesar 8 persen

disebabkan oleh faktor-faktor non ekonomik yang ada di luar model regresi ini. Dari hasil pengujian yang dilakukan setelah dimasukkan kebijaksanaan deregulasi perbankan maka didapatkan angka koefisien korelasi ( $r$ ) yakni sebesar 0,9900 atau 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat sesuai dengan formula yang digunakan adalah cukup kuat (cukup erat), koefisien determinasi yang diperoleh ( $r^2$ ) adalah sebesar 0,9801 atau 98,01 persen, memberikan arti bahwa fluktuasi (naik turunnya) tingkat variabel terikat sebanyak 98,01 persen ditentukan oleh variabel-variabel bebas, dengan perkataan lain bahwa naik turunnya tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Selatan, 98,01 persen ditentukan oleh tingkat PDRB, tingkat suku bunga bank dan jumlah kantor bank, sedangkan sisanya 1,99 persen disebabkan oleh faktor non ekonomik lainnya yang berada diluar formula regresi.

## 5.2. Saran-saran

Berdasarkan dari berbagai simpulan di atas, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran-saran yang kiranya dapat bersifat konstruktif sebagai berikut :

1. Dengan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi perbankan, khususnya dalam mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat, maka diharapkan pemerintah dapat melahirkan lagi paket-paket kebijaksanaan yang serupa.



Sehingga dapat mendorong perbaiki tingkat tabungan masyarakat ke tingkat yang lebih baik di masa akan datang.

2. Diharapkan supaya dalam melahirkan berbagai paket kebijaksanaan baru, seyogyanya diikuti pula dengan tindakan-tindakan lain seperti penyiapan ketentuan-ketentuan pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Selain perlu antisipasi penyiapan aparat pelaksana pengamanan secara lebih efektif, agar hasil yang diperoleh nantinya dapat memberikan dampak konstruktif terhadap tabungan masyarakat, di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada khususnya.
3. Agar paket-paket kebijaksanaan yang diterapkan secara nasional dapat ditafsirkan secara tepat dan benar oleh pelaku kebijaksanaan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun regional, khususnya di Sulawesi Selatan, sehingga target yang diharapkan dari setiap kebijaksanaan deregulasi itu dapat dicapai secara memadai.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang penulis ajukan, mengingat akan pentingnya untuk memecahkan berbagai masalah-masalah ekonomi yang ada, maka tulisan ini mungkin hanya salah satu wadah penulisan dengan segala keterbatasannya. Banyak kekurangan serta persoalan yang belum ditinjau dalam penulisan skripsi ini, bukan saja keterbatasan materi serta pengetahuan tetapi juga pengalaman yang masih kurang dari penulis sebagai seorang mahasiswa untuk menulis yang juga turut membatasi hal tersebut.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan agar kelak akan muncul tulisan-tulisan lainnya, yang mungkin merupakan lanjutan ataupun penyempurnaan tulisan ini, maupun untuk masalah-masalah ekonomi lain yang sampai kini masih belum terpecahkan.

Dengan segenap kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan, *Billahit taufiq wal hidayah.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Panetto, "Beberapa Aspek Teori Dan Pengimplementasian Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan, Dengan Kasus Indonesia", Ujungpandang : Hasanuddin University Press, 1996
- Ace Pratadireja, "Perhitungan Pendapatan Nasional", LP3ES, Jakarta 1977
- Anwar Nasution, "Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi tahun 1988 pada Sistem Perbankan Indonesia", Jakarta : PT. Gramedia, tahun 1990
- Dudley G. Lockett, "Uang dan Perbankan", edisi ke 2, Jakarta : Erlangga, tahun 1988
- J. Soedrajat Djiwandono, "Kebijakan Moneter dan Perbankan di Indonesia Dewasa Ini", Warta ISEI, Jakarta, Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1993
- J. Supranto, "Ekonometrika", Jilid I, Jakarta : LPFE-UI, 1988, hal 68
- Mudrajat Kuntjoro, "Deregulasi Perbankan Indonesia", Jakarta : Prisma, 1994
- Nopirin, "Ekonomi Moneter", Yogyakarta : BPFE, tahun 1984
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, "Ekonomi". jilid 1, edisi ke 12, Jakarta : tahun 1986
- Rüdiger Dornbusch dan Stanley Fischer, "Makro Ekonomi", Edisi ke 3. Alih bahasa Rudy P. Sitompul, Drs, MA. Jakarta : Erlangga, 1986
- Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", Jakarta : LPFE-UI, 1991

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:FIFIN LABEL: Skripsi  
 NUMBER OF CASES: 16 NUMBER OF VARIABLES: 8

NAME	MEAN	STD. DEV.
x1	2498095.5625	923207.8495
x2	15.8225	3.9514
x3	199.1875	91.6466
VAR.: Y	579053.0000	676018.7906

DEPENDENT VARIABLE: Y

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 12)	PROB.	PARTIAL R <sup>2</sup>
-.0050	.1932	-.026	.97782	5.55958E-05
-43392.8580	16574.9987	-2.618	.02247	.3635
7723.8844	1843.2038	4.190	.00125	.5940
CONSTANT	-260399.5111			

ERROR DF EST. = 212209.1689

ADJUSTED R SQUARED = .9015  
 R SQUARED = .9212  
 MULTIPLE R = .9598

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	6314628303156.6000	3	2.10468E+12	46.741	6.796E-07
RESIDUAL	540392776511.1200	12	45032731375.9270		
TOTAL	6855021079667.9000	15			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
21028.000	12352.303	8675.6968
28344.000	30616.936	-2272.9363
35326.000	61084.367	-25758.3665
46023.000	*****	146763.1772
66303.000	*****	169347.0729
108301.000	15001.946	93299.0545
149968.000	141857.615	8110.3846
202909.000	209570.016	-6661.0159
255499.000	536274.226	-280775.2258
418390.000	801761.100	-383371.1001
588774.000	924455.350	-365681.3498
943575.000	921578.973	21996.0269
1.2262E+06	960755.257	265395.7435
1.4588E+06	1.3792E+06	79589.4006
1.7198E+06	1.6445E+06	75316.4504
2.0257E+06	1.8496E+06	176026.9870

STANDARDIZED RESIDUALS



SHAPIRO-WILKSON TEST = .7201



REGRESSION ANALYSIS

ORDER DATA FOR: B:FIFIN LABEL: Skripsi  
 NUMBER OF CASES: 16 NUMBER OF VARIABLES: 8

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
	x1	2498095.5625	923207.8495
	x2	15.3225	3.9514
	x3	199.1875	91.6466
	d1	.3125	.4797
	d2	.3125	.4767
	d3	.1875	.4031
VAR.:	y	579053.0000	676018.7906

DEPENDENT VARIABLE: y

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 9)	PROB.	PARTIAL r <sup>2</sup>
.0739	.1320	.560	.58914	.0337
35126.7142	26374.0734	1.446	.18217	.1885
9707.5409	1952.0262	4.973	.00077	.7331
-746140.9912	261282.6510	-2.856	.01691	.4754
-1436546.5356	376382.0802	-3.817	.00411	.6181
-1030625.9817	435818.9256	-2.365	.04227	.3633
CONSTANT	-1267179.6390			

STANDARD ERROR OF EST. = 123107.0223

ADJUSTED R SQUARED = .9668

R SQUARED = .9801

MULTIPLE R = .9900

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	6718623029223.1000	6	1.11977E+12	75.886	3.825E-07
RESIDUAL	136398050444.8300	9	15155336938.3140		
TOTAL	6855021079667.9000	15			

STANDARDIZED RESIDUALS

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
1	21028.000	-14388.360
2	28344.000	26957.229
3	35326.000	72129.131
4	46023.000	-65147.725
5	66303.000	36146.504
6	106301.000	149034.895
7	149968.000	90254.532
8	202909.000	363215.774
9	255499.000	201469.057
10	412390.000	519508.614
11	558774.000	687982.122
12	943575.000	923242.409
13	1.2262E+06	1.0702E+06
14	1.4588E+06	1.6044E+06
15	1.7195E+06	1.6070E+06
16	2.0257E+06	1.9928E+06

BRIN-WATSON TEST = 2.7151